



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BOGOR

2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Jl. Ahmad Adnawijaya (Pandu Raya) No. 45A

Kota Bogor 16132

Situs web : webdukcapil.kotabogor.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Laporan ini memuat gambaran mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, capaian indikator kinerja utama, serta evaluasi dan analisis atas kinerja yang telah dicapai.

Tahun 2025 merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Berbagai inovasi pelayanan, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan integritas aparatur terus dilakukan guna meningkatkan kepercayaan publik dan kepuasan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat keterbatasan dan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, LKIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif, baik bagi internal perangkat daerah maupun bagi para pemangku kepentingan, dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor serta dalam penyusunan laporan ini. Semoga LKIP Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu instrumen pendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

KEPALA,



GANJAR GUNAWAN, A.P
NIK. 197507151993111002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		vi
DAFTAR GAMBAR		vii
RINGKASAN EKSEKUTIF		viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	2
	1.3 Dasar Hukum	3
	1.4 Cascading sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	4
	1.5 Peta Proses Bisnis	6
	1.6 Gambaran Umum dan Organissasi	6
	1.6.1 Kedudukan	6
	1.6.2 Tugas dan Fungsi	6
	1.6.3 Susunan Organisasi	7
	1.7 Data Kepegawaian Tahun 2025	8
	1.8 Isu-Isu Strategis Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025	11
	1.9 Anggaran Tahun 2025	13
	1.10 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	16
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	18
	2.1 Perencanaan Kinerja	18
	2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	19
	2.1.2 Strategi dan Kebijakan	24
	2.2 Perjanjian Kinerja	29
	2.3 Keterkaitan dan Zona Integritas	31
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	34
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	34
	3.1.1 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025	34
	3.1.2 Perbandingan Kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu	56
	3.1.3 Perbandingan Kinerja Tahun 2025 dengan target kinerja jangka menengah	59
	3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Provinsi dan Nasional	63
	3.1.5 Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif sosial	65
	3.1.6 Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya (Keuangan)	67

		3.1.7	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	69
	3.2		Realisasi Anggaran	84
BAB IV			PENUTUP	89
	4.1		Kesimpulan	89
	4.2		Rencana Tindak Lanjut	89
	4.3		Penghargaan, Inovasi dan Predikat yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	90
LAMPIRAN			Dokumen Kegiatan Tahun 2025	95

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Penyusunan LKIP ini merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjadi instrumen evaluasi kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran.

Pada Tahun 2025, Disdukcapil Kota Bogor melaksanakan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel serta Tata Kelola Pelayanan Publik yang berkualitas sekaligus menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas legalitas kependudukan. Sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam indikator kinerja utama (IKU) yang terukur dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah

Secara umum, capaian kinerja Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **baik dan memuaskan**. Sebagian besar indikator kinerja utama berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025 mencapai **89,25** dengan predikat **A (Memuaskan)**. Meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi tersebut masih berada dalam kategori yang sama dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan, khususnya dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi kinerja agar tetap *on the track*

Dari sisi kualitas pelayanan publik, Disdukcapil Kota Bogor terus melakukan berbagai upaya peningkatan layanan melalui inovasi pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan jemput bola, serta penguatan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan. Upaya tersebut berdampak positif terhadap peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan tingkat kepuasan masyarakat, sebagaimana tercermin dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang melampaui target yang ditetapkan.

Pengelolaan anggaran pada Tahun 2025 dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel dengan tetap berorientasi pada pencapaian hasil (outcome). Optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penguatan kompetensi aparatur, serta pengembangan inovasi menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian kinerja organisasi. Selain itu, Disdukcapil Kota Bogor juga terus memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kinerja masih dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain meningkatnya kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan, perlunya penguatan integrasi dan pemanfaatan data kependudukan lintas sektor, serta peningkatan konsistensi dalam perencanaan dan pengendalian kinerja. Tantangan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan dan rencana tindak lanjut pada tahun berikutnya.

Melalui penyusunan LKIP Tahun 2025 ini, Disdukcapil Kota Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Penyusunan LKIP merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sebagai implementasi dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP menjadi instrumen penting dalam menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025–2026 serta Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, Disdukcapil Kota Bogor berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima. Hal ini diwujudkan melalui penguatan sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan data kependudukan, serta penguatan integritas aparatur dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Selain itu, penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan pada tahun 2025 juga diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan, antara lain meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan transparan, dinamika perubahan regulasi, serta kebutuhan akan data kependudukan yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan

pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengukuran kinerja melalui indikator kinerja utama, survei kepuasan masyarakat (SKM), dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

LKIP Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Disdukcapil Kota Bogor kepada Wali Kota Bogor, DPRD, dan masyarakat, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja, tantangan, serta langkah strategis yang akan ditempuh guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di masa mendatang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan selama Tahun Anggaran 2025. LKIP disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan, khususnya Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Selain itu, LKIP menjadi instrumen penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta sebagai wujud komitmen Disdukcapil Kota Bogor dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*).

Tujuan Penyusunan LKIP

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menilai Tingkat Pencapaian Kinerja
Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra Disdukcapil.
2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Wali Kota Bogor, serta masyarakat atas penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan program pelayanan administrasi kependudukan
3. Sebagai bahan evaluasi dan Perbaikan berkelanjutan
Memberikan dasar dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi, mengidentifikasi kendala dan permasalahan, serta merumuskan langkah perbaikan dan penyempurnaan pelayanan ke depan.
4. Mendukung penerapan SAKIP dan Zona Integritas
Sebagai instrumen penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mendukung pencapaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Mendorong peningkatan mutu pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, pasti, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres 96 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119);

1.4. Cascading sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan paradigma organisasi berbasis kinerja yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Bogor, dimana setiap Perangkat Daerah

dibentuk untuk dapat memberikan kontribusi pada capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

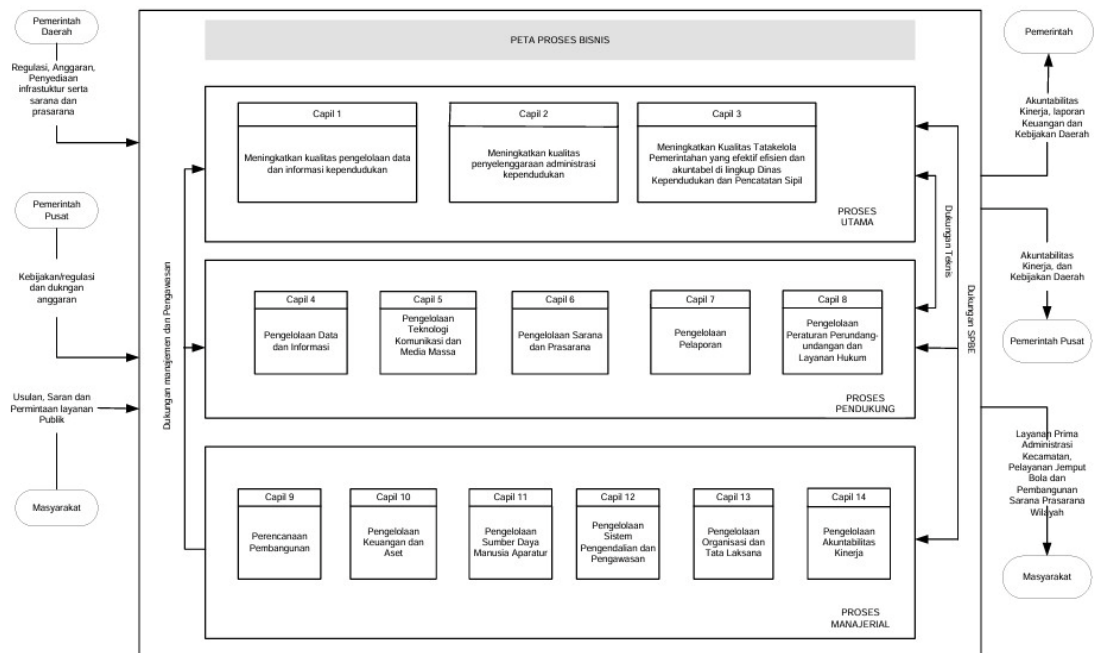
Gambar 1.4.1
Cascading dan Pohon Kinerja



Dapat di lihat pada Aplikasi SADAYA :
<https://dev-sadaya.kotabogor.go.id/public-display/display-mikro/cascading>

1.5. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis



Link Peta Proses Bisnis dapat diakses pada tautan berikut :
https://drive.google.com/drive/folders/1gzV2kH6wFUeZzZV-0F5d_0Xi4tvWpIDj

1.6. Gambaran Umum dan Organisasi

1.6.1. Kedudukan

Berdasarkan Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 137 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Disdukcapil Kota Bogor adalah unsur pelayanan Masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan untuk sub bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor berkedudukan di Jalan Ahmad Adnawijaya (Pandu Raya) Nomor 45A Bogor Utara Kota Bogor.

1.6.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan Sebagian urusan pemerintah daerah di

bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

1.6.3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan Sebagian urusan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kep[ependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Bogor.

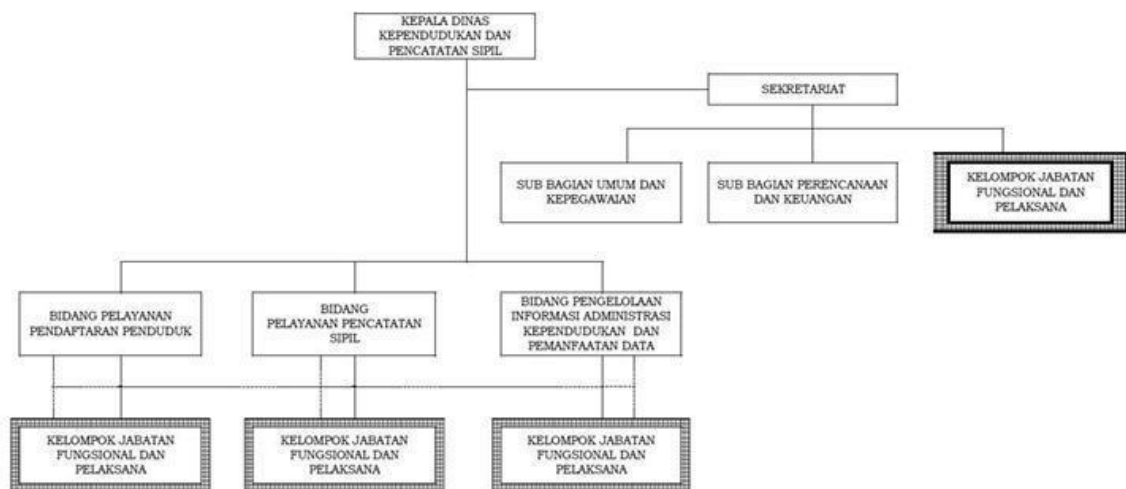
Kepala Disdukcapil dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris, 3 (tiga) bidang, 2 (dua) Sub Bagian dan Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Jabatan Fungsional
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Tiga Kelompok Jabatan Analisis Kebijakan
 - b. Staf
4. Bidang Pencatatan Sipil
 - a. Tiga Kelompok Jabatan Analisis Kebijakan

- b. Staf
- 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
 - a. Tiga Kelompok Jabatan Analisis Kebijakan
 - b. Staf

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, disajikan dalam Gambar 1.1

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Bogor



1.7. Data Kepegawaian tahun 2025

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor memiliki 81 Pegawai, terdiri dari 47 PNS dan 1 P3K dan 33 Non ASN. Dalam menjalankan tugas Pokok dan fungsinya Disdukcapil Kota Bogor didukung oleh PNS berjumlah 48 Pegawai dengan kondisi sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegaewai berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	S2	4
2	S1	28
3	Diploma	2

4	SMA	14
5	SMP	0
6	SD	0
JUMLAH		48

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai menurut Golongan

No	Uraian	Golongan					Jumlah
		I	II	III	IV	PPPK	
1	Kepala				1		1
2	Sekretariat		1	12			13
3	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1	16	1		18
4	Bidang Pencatatan Sipil			6	1		7
5	Bidang PIAK		2	6		1	9
Jumlah		0	4	40	3	1	48

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai menurut Jabatan Struktural

No	Uraian	Eselon			Fungsional
		II	III	IV	
1	Kepala	1			
2	Sekretariat		1	2	
3	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1		3
4	Bidang Pelayanan Pencatatan DSipil		1		2

5	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan Data		1		3
Jumlah		1	4	2	8

Tabel 1.5
Jumlah Tenaga Non ASN Sampai dengan Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah
1	Operator Pelayanan	20
2	Kebersihan	6
3	Keamanan	5
4	Pengemudi	2
Jumlah		33

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Disdukcapil Kota Bogor berdasarkan jenis kelamin sampai dengan Tahun 2025

No	Uraian	Pria	Wanita
1	Kepala	1	
2	Sekretariat	6	7
3	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	13	4
4	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	3	5
5	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pengelolaan Data	7	7
Jumlah		30	18

1.8. Isu-Isu Strategis Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025

Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan penting yang harus mendapat perhatian serius karena berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Pada Tahun 2025, Disdukcapil Kota Bogor menghadapi sejumlah isu strategis sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan**
Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan menuntut peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. Meskipun telah dilakukan berbagai inovasi pelayanan, masih diperlukan penguatan standar pelayanan, peningkatan kenyamanan sarana prasarana, serta konsistensi penerapan SOP agar pelayanan dapat berjalan optimal dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. **Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi**
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi isu strategis utama. Diperlukan penguatan budaya kerja berintegritas, peningkatan pengawasan internal, serta transparansi dalam pelayanan publik guna mencegah potensi praktik korupsi, pungutan liar, dan maladministrasi.
3. **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Layanan**
Perkembangan teknologi informasi menuntut Disdukcapil untuk terus beradaptasi melalui digitalisasi layanan kependudukan. Tantangan yang dihadapi meliputi kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan data kependudukan, serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital guna mendukung pelayanan yang efektif dan efisien.
4. **Akurasi dan Pemutakhiran Data Kependudukan**
Ketersediaan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Permasalahan seperti data ganda, perubahan status penduduk, serta mobilitas penduduk yang

tinggi menjadi tantangan yang perlu ditangani melalui pendataan berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi informasi.

5. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM

Kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi faktor kunci keberhasilan pelayanan. Masih diperlukan peningkatan kompetensi teknis, pemahaman regulasi, serta penguatan etika pelayanan publik agar aparatur mampu memberikan pelayanan yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

6. Perluasan Akses Layanan bagi Kelompok Rentan

Masih terdapat kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat miskin, dan penduduk rentan administrasi. Oleh karena itu, penguatan layanan inklusif dan pelayanan jempot bola menjadi isu strategis yang perlu terus dikembangkan.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Anggaran

Tuntutan terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja yang terukur semakin meningkat. Hal ini menuntut Disdukcapil untuk memperkuat perencanaan berbasis kinerja, pengukuran capaian yang akurat, serta pelaporan kinerja yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip SAKIP.

8. Sinergi dan Kolaborasi Antar Perangkat Daerah

Pelayanan administrasi kependudukan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan lintas sektor. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah lain, kecamatan, kelurahan, serta instansi vertikal menjadi isu strategis dalam mewujudkan pelayanan yang terpadu dan berkelanjutan.

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025, serta menjadi acuan dalam penyusunan target kinerja dan strategi pencapaian hasil yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.

1.9. Anggaran Tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan alokasi anggaran Murni sebesar Rp. 17.485.547.372,- (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), dan telah mengalami penambahan anggaran yang di terima setelah perubahan sebesar Rp. 19.796.174.266,- (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.7
Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Pagu Murni	Pagu Perubahan
I	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.623.283.024
	1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.816.500	113.816.599
		1 Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.816.500	113.816.599
	2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.488.077.388	10.762.091.874
		2 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.439.504.588	10.704.349.074
		3 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48.572.800	57.742.800
	3	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	416.542.300	536.632.600
		4 Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi	17.388.300	17.388.300

			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
		5	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.784.500	40.784.500
		6	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	178.469.900	190.232.400
		7	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.289.400	17.289.400
		8	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.855.200	148.215.200
		9	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.755.000	122.722.800
	4	Kegiatan : Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		660.084.600	2.071.216.500
		10	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	660.084.600	2.071.216.500
	5	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		1.846.026.848	1.590.808.256
		11	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	268.159.720	276.131.528
		12	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.577.867.128	1.314.676.728
	6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		548.717.294	548.717.294
		13	Sub Kegiatan : Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Lapangan	178.973.325	178.973.325
		14	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor	234.010.000	234.010.000
		15	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana	135.733.969	135.733.969

			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
II	PROGRAM : PENDAFTARAN PENDUDUK			2.720.044.000	3.270.368.700
	7	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk		15.631.700	110.631.700
		16	Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	15.631.700	110.631.700
	8	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		2.704.412.300	3.159.737.000
		17	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	2.704.412.300	3.159.737.000
III	PROGRAM : PENCATATAN SIPIL			140.889.700	140.889.700
	9	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil		60.562.000	60.562.000
		18	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	60.562.000	60.562.000
		19	Sub Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	0	0
	10	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		80.327.700	80.327.600
		20	Sub Kegiatan : Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	80.327.600	80.327.600
IV	PROGRAM: PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			551.348.742	761.632.942
	11	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		483.798.800	694.083.000
		21	Sub Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	62.527.300	62.527.300

		22 Sub Kegiatan : Inventarisasi Data untuk kepentingan pembangunan daerah	421.271.500	631.555.700
	12 Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		67.549.942	67.549.942
		23 Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan	67.549.942	67.549.942
JUMLAH PAGU			17.485.547.372	19.796.174.266

1.10. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Berikut ini merupakan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kota Bogor Nomor 700/39/VI-LHE/2024/Itda tanggal 07 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 1.8
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Kelemahan Atas Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Ketrerangan	Bukti Evident
			S	D	B		
	Laporan Kinerja Tahun 2023 belum dilakukan revidi oleh Tim Internal Disdukcapil Kota Bogor	Membuat jadwal program kerja revidi internal untuk melaksanakan Laporan Kinerja Disdukcapil Kota Bogor periode Tahun 2024	√			Telah membuat jadwal dan program Kerja Revidi Internal untuk melaksanakan Revidi laporan Kinerja Disdukcapil Kota Bogor Periode Tahun 2024	
Rencana Aksi Tahun 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1ITeEV03g-L0paxAmk2eRg0cE5wUBFmPm							
	Belum dibentuk Tim Evaluasi Internal atas	Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan	√			Telah membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tentang	

	Pelaporan Kinerja	Sipil Kota Bogor tentang Tim Reviu Kinerja Internal PD untuk Tahun 2024				Tim Review Kinerja Internal PD untuk periode Tahun 2024	
SK Kepala Disdukcapil Kota Bogor Nomor 800/11-Disdukcapil Tahun 2024 tentang Tim Evaluator Internal Evaluasi Pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor https://drive.google.com/drive/folders/1RxU2UhXOacBMmKf0QXlyuvAszyvZHzLs							
JUMLAH			2				

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025–2026 sebagai dokumen transisi pasca berakhirnya RPJMD sebelumnya.

Perencanaan kinerja ini disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 mendukung pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Bogor Tahun 2025–2026, khususnya pada aspek:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berbasis digital;
- Pemenuhan hak dasar masyarakat melalui pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif, cepat, dan akurat.

Peran strategis Disdukcapil diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan, validitas dan pemanfaatan data kependudukan, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi pedoman utama dalam penyusunan perencanaan kinerja tahunan. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra dijabarkan ke dalam sasaran kinerja tahunan, indikator kinerja, serta target yang terukur pada Tahun 2025.

Adapun keterkaitan tersebut diwujudkan melalui:

- Penjabaran visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- Penetapan indikator kinerja utama (IKU) yang selaras dengan sasaran strategis Renstra;
- Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

2.1.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Tujuan Rencana Strategis Disdukcapil adalah terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel serta tata Kelola pelayanan publik yang berkualitas dan terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan legalitas lependudukan. Tujuan tersebut mencerminkan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Adapun penjabaran dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
Disdukcapil berupaya mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan secara terukur, tepat sasaran, dan berbasis kinerja. Efektivitas diwujudkan melalui pencapaian target pelayanan kependudukan, sedangkan efisiensi dicapai melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Disdukcapil dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, serta pengawasan internal. Akuntabilitas ini tercermin dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang selaras dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas legalitas kependudukan
Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan public

Pelayanan administrasi kependudukan diselenggarakan secara profesional, mudah diakses, cepat, pasti, dan berkeadilan dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, penetapan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan budaya kerja aparatur yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan.

4. Menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas legalitas kependudukan
Disdukcapil memastikan seluruh penduduk memperoleh dokumen kependudukan yang sah dan valid, seperti KTP-el, Kartu Keluarga, akta pencatatan sipil, serta dokumen kependudukan lainnya. Pemenuhan hak ini menjadi dasar penting bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak sipil lainnya.

Tabel 2.1
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Disdukcapil Kota Bogor s.d 2025

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian 2023	Capaian 2024	Target 2023	Target 2024	Target 2025
Tahun 2023 dan 2024							
1	Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi	A	A	A	A	-
	Sasaran ke 1 : Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkup perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perangkat Daerah			81	82	-
	Sasaran ke 2 : Meningkatnya kualitas Pengelolaan data dan informasi kependudukan	Persentase pengelolaan data dan informasi kependudukan			100%	100%	-
2	Tujuan 2 : Terwujudnya landasan legalitas kependudukan dalam rangka mendukung ketahanan keluarga	Persentase penduduk yang memiliki legalitas administrasi kependudukan			100%	100%	-

	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	Presentase penduduk yang terlayani			100%	100%	-
Tahun 2025							
1	Tujuan1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Efisien dan Akuntabel serta tata Kelola pelayanan public yang berkualitas	1. Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah					A Predikat
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat					3.80 Indeks
	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	1. Nilai SAKIP di Lingkup Disdukcapil Kota Bogor					91.50 Nilai
		2. Kepatuhan pengelolaan Keuangan					98.30 %
		3. Persentase Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK/Itida					100%
		4. Jumlah Inovasi PD yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah (Tingkat Kematangan Inovasi >70)					1 Inovasi
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public di lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah					95.00 Nilai
2	Tujuan 2 : Terpenuhinya hak masyarakat untuk	Persentase pemenuhan					99.20 %

	mendapatkan legalitas kependudukan	identitas kependudukan					
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan dan pemanfaatan Dokumen Kependudukan	1. Persentase penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP					100 %
		2. Persentase anak yang memiliki KIA					82.00 %
		3. Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 tahun					99.20 %
		4. Persentase pemanfaatan data agregat kependudukan dan Pencatatan Sipil					69.44 %

Untuk mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) agar terlihat ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Capaian IKU ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan. Penetapan indikator Kinerja Utama (IKU) Disdukcapil untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Disdukcapil Kota Bogor
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			Penanggung jawab	Sumber Data	Ket
		Uraian Indikator Kinerja	Formulasi/ Cara Perhitungan	Satuan			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan PD	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan	Hasil Perhitungan BAPPERIDA	Inovasi/ Tahun/ PD	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disduk Capil Kota Bogor	

		menjadi inovasi Daerah (Tingkat Kematangan Inovasi > 70)			dan Pemanfaatan Data		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	$\sum \text{Jumlah Rata-rata (Interval)} / \sum \text{Jumlah Pertanyaan} \times 100\% / 6$	Nilai	Sekretaris Dinas	Disduk Capil Kota Bogor	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerbitan dan Pemanfaatan Dokumen Kependudukan	Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP	$\sum \text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-elektronik} / \sum \text{Jumlah Wajib KTP} \times 100\%$	Persen	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disduk Capil Kota Bogor	
		Persentase Anak yang memiliki KIA	$\sum \text{Jumlah Anak yang memiliki KIA} / \sum \text{Jumlah Anak usia 0-17 Tahun Kurang 1 hari} \times 100\%$	Persen	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disduk Capil Kota Bogor	
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 Tahun	$\sum \text{Jumlah anak usia 0-18 Tahun yang memiliki Sakta Kelahiran} / \sum \text{Jumlah Keseluruhan Anak usia 0-18 Tahun} \times 100\%$	Persen	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Disduk Capil Kota Bogor	
		Persentase Pemanfaatan Data Agregat Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\sum \text{Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan} / \sum \text{Jumlah}$	Persen	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	Disduk Capil Kota Bogor	

			Perangkat Daerah di Kota Bogor x 100%		Pemanfaatan Data		
--	--	--	---------------------------------------	--	------------------	--	--

2.1.2. Strategi dan Kebijakan

Rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor diantaranya :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan RPD :	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			
Sasaran RPD :	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang efektif, Lincah dan Kolaboratif			
Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata Kelola pelayanan public yang berkualitas		Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Disdukcapil Kota Bogor		
	Sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP di Lingkup Disdukcapil Kota Bogor	Meningkatkan kualitas penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah yang sinergis dengan perencanaan Pembangunan daerah, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja serta system pengendalian intern	1. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja Disdukcapil secara berkelanjutan 2. Penguatan Sinergitas kebijakan dan Program Kerja

			organisasi secara berkelanjutan	Disdukcapil dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja perencanaan Pembangunan daerah 3. Peningkatan kualitas pengelolaan resiko Disdukcapil dalam pencapaian target kinerja organisasi 4. Penguatan system pengendalian intern Disdukcapil 5. Pengembangan Inovasi yang berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi 6. Penguatan system monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan 7. Penerapan reward dan punishment sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja organisasi dan individu
		2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Meningkatkan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan sesuai	1. Penguatan Tata Kelola Keuangan sesuai dengan

			dengan peraturan yang berlaku	standar yang telah ditetapkan 2. Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM
		3. Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku	1. Penguatan Tata Kelola Keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan 2. Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM
		4. Jumlah Inovasi PD yang ditetapkan menjadi inovasi Daerah (Tingkat Kematangan Inovasi > 70)	Meningkatkan kualitas Inovasi	1. Pengembangan Inovasi sesuai dengan kebutuhan 2. Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public di Lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan Disdukcapil sesuai dengan saran dan masukan dari pengguna layanan	1. Peningkatan kualitas SDM Disdukcapil baik dari sisi Kompetensi maupun penguatan core value Berakhlak 2. Pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan rencana kebutuhan 3. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang lebih responsive

				4. Peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh Disdukcapil sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
Tujuan 2 : Terpenuhinya hak Masyarakat untuk mendapatkan Legalitas Kependudukan	Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan dan pemanfaatan Dokumen Kependudukan	Persentase pemenuhan identitas kependudukan		
		Persentase penduduk Wajib KTP yang memiliki e-KTP	Meningkatkan akses dan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan Prosedur penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan 3. Penguatan Sumber Daya SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
		Persentase anak yang memiliki KIA		
		Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 Tahun		
		Persentase Pemanfaatan Data Agregat Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

Tabel 2.4
Sasaran , Program dan Kegiatan Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025

No	Sasaran	program	Kegiatan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public di lingkup perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Umum Perangkat daerah 2. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	Meningkatnya Kualitas pelayanan penerbitan dan pemanfaatan dokumen kependudukan	Pendaftaran Penduduk	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
		Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 2. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan /kesepakatan/perjanjian kinerja antara pimpinan dan staff untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, Indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2026 dan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 dibuat sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja Pembangunan. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Mengacu pada hal yang sudah ditetapkan tersebut, dengan mempertimbangkan prioritas Pembangunan dan arah kebijakan Pembangunan maka target kinerja utama yang diperjanjikan Disdukcapil Kota Bogor tahun 2025 adalah :

Gambar 2.2.1.
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	Nilai	91,50	89,25
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	98.30	86.61
		Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	Persen	100	72.29
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah (Tingkat Kematangan Inovasi >70)	Inovasi/ Tahun/ PD	1	3

2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public di Lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Point	95	95.21
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan penerbitan dan pemanfaatan Dokumen Kependudukan	Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP	Persen	100	100
		Persentase Anak yang mremiliki KIA	Persen	82	82.10
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 Tahun	Persen	99.20	99.22
		Persentase Pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	69.44	69.44

Gambar 2.2.2
Lampiran Program Pagu Anggaran dan Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran		Sumber Dana
		APBD 2025	P-APBD 2025	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.782.948.930	15.623.283.024	APBD
2	Pendaftaran Penduduk	2.720.044.000	3.270.368.700	APBD
3	Pencatatan Sipil	154.735.300	140.889.600	APBD
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	272.425.642	761.632.942	APBD
Jumlah		16.930.103.872	19.796.174.266	

--	--	--	--

2.3. Keterkaitan dengan Zona Integritas

Perencanaan kinerja Tahun 2025 juga diarahkan untuk mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBBM melalui:

a. Penguatan Manajemen Perubahan

LKIP menjadi sarana untuk memastikan bahwa perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur telah berjalan secara sistematis. Perencanaan kinerja, pelaksanaan program, hingga evaluasi capaian dilakukan secara terukur dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen reformasi birokrasi.

b. Penataan Tata Laksana

Melalui LKIP, seluruh proses kerja dan pelaksanaan kegiatan terdokumentasi dengan baik dan terukur. Hal ini mendukung penyederhanaan proses bisnis, peningkatan efektivitas pelayanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.

c. Penataan Sistem Manajemen SDM

LKIP memuat kinerja aparatur berdasarkan tugas dan fungsi yang jelas, sehingga mendorong peningkatan profesionalisme, kedisiplinan, serta akuntabilitas individu dan unit kerja. Capaian kinerja menjadi dasar evaluasi dan pembinaan SDM.

d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

LKIP merupakan instrumen utama dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui pelaporan kinerja yang terukur dan berbasis indikator, Disdukcapil memastikan bahwa penggunaan sumber daya dan anggaran memberikan hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Penguatan Pengawasan

LKIP mendukung penguatan pengawasan internal melalui evaluasi capaian kinerja, identifikasi risiko, dan tindak lanjut atas permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini menjadi bagian dari upaya pencegahan penyimpangan dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Melalui pengukuran kinerja seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), LKIP berperan dalam memastikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan berjalan sesuai standar pelayanan, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta bebas dari praktik maladministrasi.

LKIP Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025 mendukung pencapaian sasaran Zona Integritas melalui:

1. Transparansi Kinerja dan anggaran, sehingga mendorong kepercayaan publik;
2. Penguatan Budaya Integritas, melalui pengukuran kinerja yang objektif dan berkelanjutan;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terukur melalui nilai IKM dan IPAK
4. Pencegahan Praktik Korupsi dengan memperkuat pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja utama (IKU) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Secara umum, capaian kinerja Disdukcapil Kota Bogor pada tahun 2025 telah sesuai target ditandai dengan tercapainya seluruh indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

3.1.1. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan upaya-upaya yang dilakukan antara lain strategi, program, dan kegiatan serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor telah tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Nomor 800/7 – Disdukcapil Tahun 2025 tentang Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 800/36-Disdukcapil tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama. Dimana dalam SK tersebut tercantum bahwa terdapat 6 indikator Sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama pada Disdukcapil Kota Bogor. Sementara untuk Sasaran Kinerja sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dengan Walikota Bogor

terdapat 3 Sasaran. Realisasi kinerja Disdukcapil Tahun 2025 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Realisasi Capaian IKU Disdukcapil Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Kinerja		Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (Tingkat Kematangan Inovasi >70)	Inovasi/ Tahun /PD	1	3	300
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public di lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	95	95.21	100.22
3	Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan dan pemanfaatan dokumen kependudukan	Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP	Persen	100	100	100
		Persentase Anak yang memiliki KIA	Persen	82	82.10	100.12
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 Tahun	Persen	99.20	99,20	100
		Persentase Pemanfaatan data agregat	Persen	69.44	69.44	100

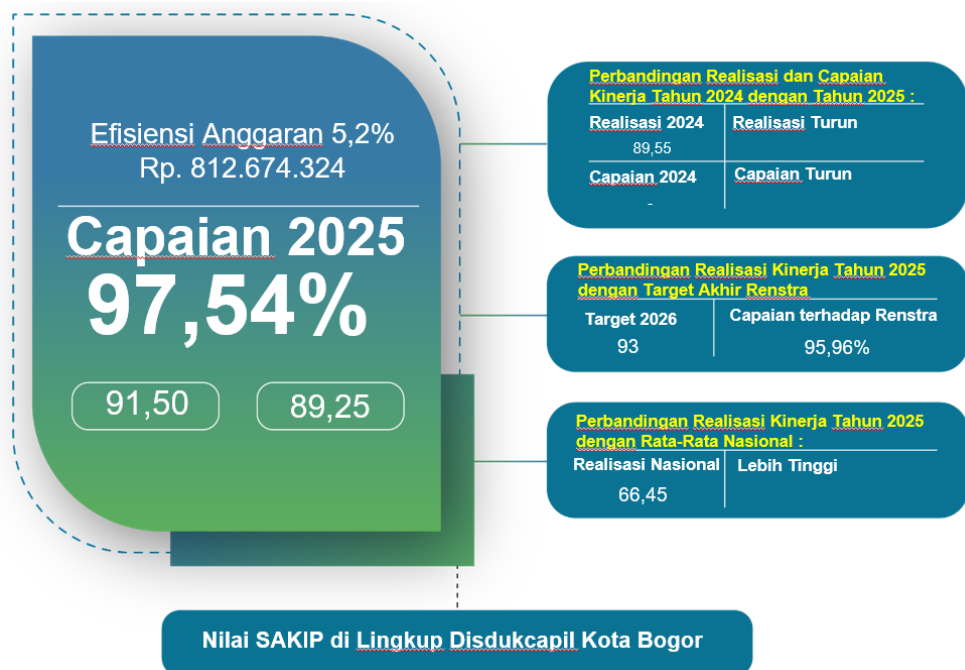
		kependudukan dan pencatatan sipil				
--	--	---	--	--	--	--

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Realisasi Disdukcapil Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Kinerja		Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	Nilai	91,50	89,25	97,54
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	98.30	86.61	88.11
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	Persen	100	72.29	72.29
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (Tingkat Kematangan Inovasi >70)	Inovasi/ Tahun /PD	1	3	300
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public di lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	95	95.21	100.22
3	Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan dan pemanfaatan dokumen kependudukan	Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP	Persen	100	100	100

		Persentase Anak yang memiliki KIA	Persen	82	82.10	100.12
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 Tahun	Persen	99.20	99,20	100
		Persentase Pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	69.44	69.44	100

Bagan Capaian Sasaran 1



Nilai sakip perangkat daerah digunakan untuk mengukur pada perangkat daerah digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah. Nilai sakip diukur dan dipublikasikan oleh Inspektorat Kota Bogor. Pada tahun 2025, realisasi nilai sakip mencapai 89.25 dari target yang ditetapkan sebesar 91.50, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 97.54%.

Pada aspek realisasi, nilai sakip dinas 89.25 mengalami penurunan sebesar 0.30 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 89.55 pada tahun 2024 menjadi 89.25 pada tahun 2025.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator nilai sakip tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2025–2029 dengan target predikat A dan nilai akhir sebesar 89.8. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut baru mencapai 99.38%.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi nilai sakip dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor menunjukkan kinerja yang lebih baik. Realisasi nilai sakip dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercatat sebesar 89.25, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Kota Bogor sebesar 78.96, Provinsi Jawa Barat dengan nilai 69.05 dan nasional sebesar dengan nilai 66.45. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.

Faktor penghambat yaitu terdapat catatan pada LHE pada aspek Perencanaan Kinerja khususnya pada Pemanfaatan Perencanaan Kinerja yang mana Perencanaan Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 belum optimal berdasarkan laporan kinerja sub kegiatan pada aplikasi SIABANG tercatat capaian kinerja sasaran sub kegiatan sebesar 19.62% dan capaian realisasi anggaran baru sebesar 43.58%.

Dalam rangka mengakselerasi capaian kinerja di tahun mendatang, diperlukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut membuat pengingat terkait dengan anggaran kas di masing-masing bidang.

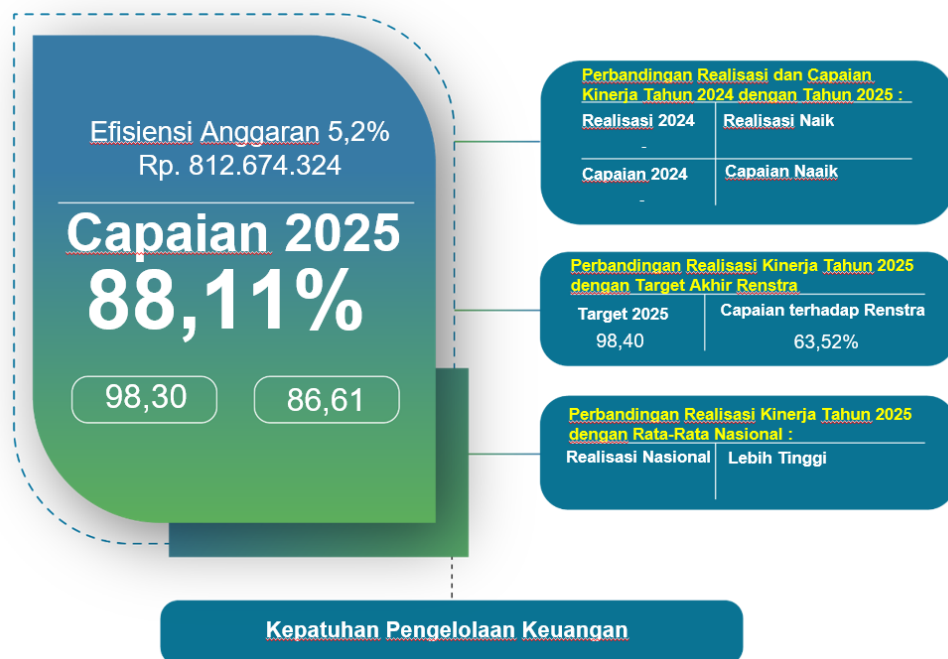
Program yang mendukung pencapaian nilai sakip yaitu program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Total pagu anggaran sebesar Rp. 15.623.283.024, terealisasi sebesar Rp. 14.810.608.700

Rencana perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat ialah :

1. Melaksanakan rencana aksi dan target yang telah ditetapkan secara optimal pada triwulan berikutnya. Serta memastikan bahwa target kinerja tetap *on the track* hingga akhir tahun dengan melakukan pemantauan dan evaluasi yang efektif secara berkala, sehingga dapat mewujudkan hasil yang lebih baik pada triwulan berikutnya

2. Menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja triwulan kepada bidang-bidang dan melakukan Tindakan korektif apabila target kinerja tidak tercapai.

Bagan Capaian Sasaran 2



Kepatuhan Pengelolaan Keuangan digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perangkat daerah mengelola keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan diukur dan dipublikasikan oleh BKAD Kota Bogor. Pada tahun 2025, realisasi persentase Kepatuhan Pengelolaan Keuangan mencapai 86.61% dari target yang ditetapkan sebesar 98.30% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 88.11%.

Pada aspek realisasi, Persentase Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena indikator Persentase Kepatuhan Pengelolaan Keuangan belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode Renstra Tahun 2019–2024.

Persentase Kepatuhan Pengelolaan Keuangan tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2019–2024 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun 2025–2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target

jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 sebesar 98.40% sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga diperoleh capaian sebesar 63.52% .

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator Persentase Kepatuhan Pengelolaan Keuangan tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2025–2026 dengan target sebesar 98.40% Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut baru mencapai 63.52% sementara indikator tersebut tidak dijadikan IKU pada Renstra 2025-2029.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi Persentase Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat disajikan dan dianalisis karena perbedaan indikator antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dengan Kota, Provinsi maupun Nasional.

Faktor penghambat Persentase Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Adalah dalam aspek :

1. Pada penilaian Persentase penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu, Disdukcapil hanya mencapai 89.47% ketepatan waktunya
2. Pada penilaian Persentase Kepatuhan Anggaran yang mana merupakan ketepatan pencairan sesuai dengan perencanaan, Disdukcapil masih memiliki nilai rendah yaitu 70%

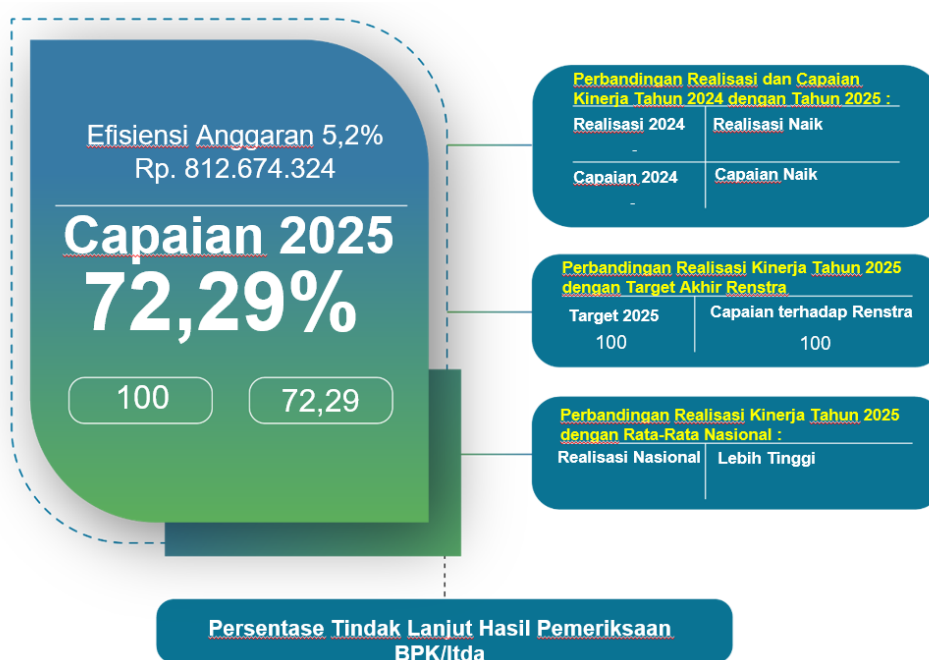
Program yang mendukung pencapaian nilai sakip yaitu program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 15.623.283.024, terealisasi sebesar Rp. 14.810.608.700.

Rencana perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 ialah :

1. Melaksanakan rencana aksi dan target yang telah ditetapkan secara optimal pada triwulan berikutnya. Serta memastikan bahwa target kinerja tetap *on the track* hingga akhir tahun dengan melakukan pemantauan dan evaluasi yang efektif secara berkala, sehingga dapat mewujudkan hasil yang lebih baik pada triwulan berikutnya

2. Menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja triwulan kepada bidang-bidang dan melakukan Tindakan korektif apabila target kinerja tidak tercapai.

Bagan Capaian Sasaran 3



Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil audit. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida diukur dan dipublikasikan oleh Inspektorat Kota Bogor. Pada tahun 2025, realisasi Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida mencapai 72.29% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 72.29%.

Pada aspek realisasi, Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode Renstra Tahun 2019–2024.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2025–2026 dengan target sebesar 100%

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut baru mencapai 72.29% Adapun IKU yang tercantum pada Renstra 2025-2029 memiliki Target 100% setiap tahunnya.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat disajikan dan dianalisis karena perbedaan indikator antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dengan Kota, Provinsi maupun Nasional.

Faktor penghambat Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda Adalah dalam aspek belum dilaksanakannya tindak lanjut BPK terkait dengan mobilitas penduduk, telah dilakukan berbagai Upaya yaitu diantaranya sedang disusunnya PERDA terkait dengan Administrasi Kependudukan yang mana setelah itu akan diturunkan Perwali khusus terkait dengan mobilitas penduduk sebagaimana rekomendasi BPK. Karena diperlukan tahapan-tahapan penyusunan Perda seperti Harmonisasi Hukum maka penyusunan Perwal Penduduk Non Permanen sebagaimana rekomendasi BPK memerlukan waktu. Selain itu juga tahun lalu masih dalam tahapan koordinasi penyusunan DBK dengan Dalduk KB.

Program yang mendukung pencapaian nilai sakin yaitu program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 15.623.283.024, terealisasi sebesar Rp. 14.810.608.700.

Rencana perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 ialah disusunnya Raperda Adminduk sebagai dasar penyusunan Perwal terkait Penduduk Non Permanen yang mana merupakan rekomendasi dari BPK.

Bagan Capaian Sasaran 4



Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (Tingkat kematangan inovasi >100) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kualitas inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah hingga layak diakui secara resmi sebagai inovasi daerah. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (Tingkat kematangan inovasi >100) diukur dan dipublikasikan oleh Bapperida Kota Bogor. Pada tahun 2025, realisasi Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (Tingkat kematangan inovasi >100) mencapai 3 inovasi dari target yang ditetapkan sebesar 1 inovasi sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 300%. 3 (tiga) inovasi yang dimaksud ialah :

1. 3 in 1 SMS (Sampurasun) yang mana merupakan layanan kondultasi dan pengaduan dengan nilai kematangan 104
2. Laksa Pedas dan Lapis Bogor dengan nilai kematangan 100
3. Pakuan Prima yang merupakan layanan berbasis online dengan nilai kematangan 104

Pada aspek realisasi, Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (Tingkat kematangan inovasi >100) dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi

inovasi daerah (Tingkat kematangan inovasi >100) belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode Renstra Tahun 2019–2024.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (Tingkat kematangan inovasi >100) tetap digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2025–2026 dengan target sebesar 1 inovasi. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut mencapai 300%. Adapun IKU yang tercantum pada Renstra 2025-2029 memiliki Target 1 inovasi setiap tahunnya.

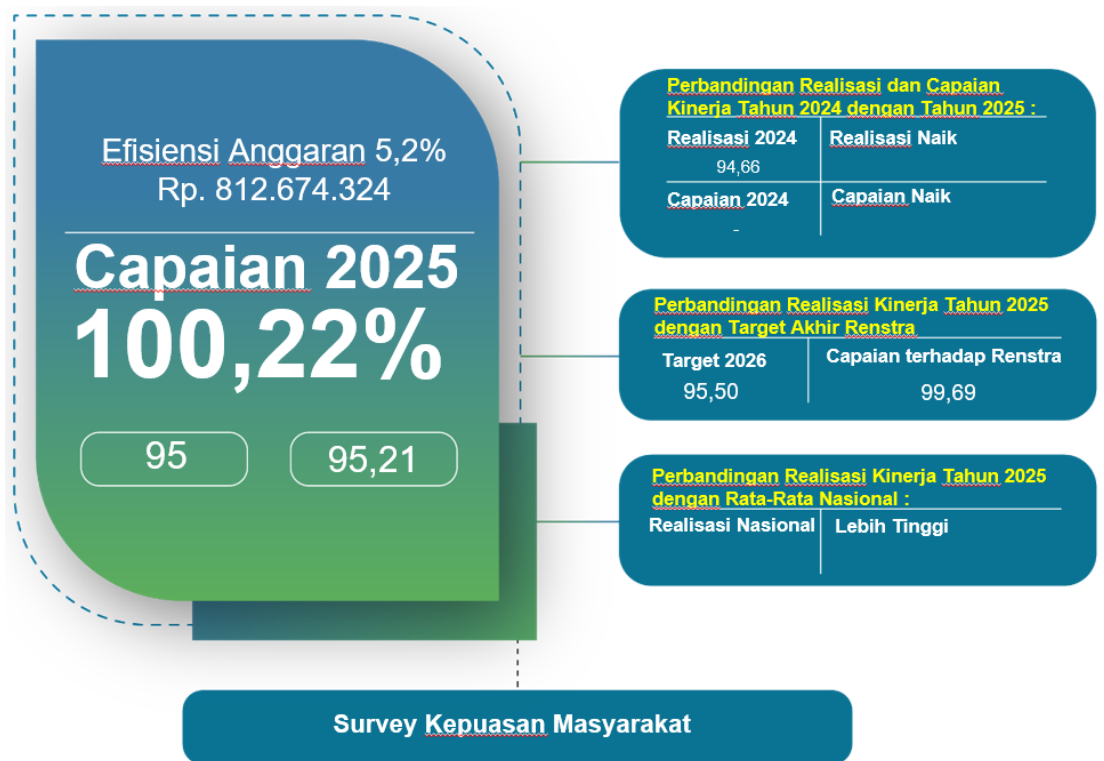
Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (Tingkat kematangan inovasi >100) dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat disajikan dan dianalisis karena perbedaan indikator antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dengan Kota, Provinsi maupun Nasional.

Faktor pendukung tercapainya Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (Tingkat kematangan inovasi >100) adalah adanya banyak inovasi yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu diantaranya 3 in 1 (Sampurasun), Laksa Pedas dan Lapis Bogor serta Pakuan Prima yang mana semuanya telah mencapai nilai kematangan diatas 100 serta adanya komitmen mulai dari atasan hingga staf dan juga Masyarakat kota bogor untuk mendukung dan menggunakan inovasi-inovasi yang dibangun, serta adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Program yang mendukung pencapaian nilai sakin yaitu program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Efisiensi indikator kinerja utama (IKU) diatas mencapai 5.2% atau setara dengan Rp. 812.674.324 yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp. 15.623.283.024, terealisasi sebesar Rp. 14.810.608.700.

Bagan Capaian Sasaran 5



Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah. Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah diukur dan dipublikasikan oleh Disdukcapil Kota Bogor sendiri. Pada tahun 2025, realisasi Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah mencapai 95.21 dari target yang ditetapkan sebesar 95 sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100.22%.

Pada aspek realisasi, Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 mengalami kenaikan dari nilai 94.66 menjadi 95.21.

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah tetap digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2025–2026 dengan target sebesar 95.50. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut mencapai 99.69%. Adapun IKU yang tercantum pada Renstra 2025-2029 tidak menjadikan nilai Survey Kepuasan Masyarakat menjadi IKU.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai nilai 95.21 lebih tinggi dari rata-rata Kota yaitu 92.52. sementara untuk perbandingan dengan nilai provinsi dan Nasional tidak dapat dianalisis karena perbedaan indicator yang diampu.

Faktor pendukung tercapainya Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah Adalah adanya banyak inovasi yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya Sampurasun, Goes to School, Layanan Sore Malam, Lapak Capil, Pakuan Prima, Prima Antri dan lainnya yang mana dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat Kota Bogor, selain itu juga kelengkapan sarana prasarana berupa Ruang Tunggu yang nyaman, Kualitas petugas yang baik, lengkapnya sarana seperti area bermain, ruang laktasi, kamar mandi umum serta kamar mandi disabilitas, sistem antrian serta integritas pegawai menunjang nilai tinggi dalam survey kepuasan yang diberikan oleh masyarakat.

Program yang mendukung pencapaian nilai saki yaitu program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Efisiensi indikator kinerja utama (IKU) diatas mencapai 5.2% atau setara dengan Rp. 812.674.324 yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp. 15.623.283.024, terealisasi sebesar Rp. 14.810.608.700.

Bagan Capaian Sasaran 6



Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP digunakan untuk mengukur tingkat cakupan kepemilikan identitas kependudukan (KTP elektronik) bagi penduduk yang wajib memilikinya. Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP diukur dan dipublikasikan oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dalam laporan DKB per semester. Pada tahun 2025, realisasi Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100 %.

Ketercapaian tersebut berdasarkan rumus $\frac{\sum \text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP Elektronik}}{\sum \text{Jumlah Wajib KTP}} \times 100\%$ yang mana berdasarkan data DKB diperoleh angka **841.543** dengan jumlah wajib KTP **841.543** sehingga capaian **100%**.

Pada aspek realisasi, Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena indikator Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode Renstra Tahun 2019–2024.

Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2019–2024 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun 2025–2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 sebesar 100% sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga diperoleh capaian sebesar 100% .

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP tetap digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2025–2026 dengan target sebesar 100% Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut mencapai 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP perbandingan dengan nilai provinsi dan Nasional tidak dapat dianalisis karena perbedaan indikator yang diampu.

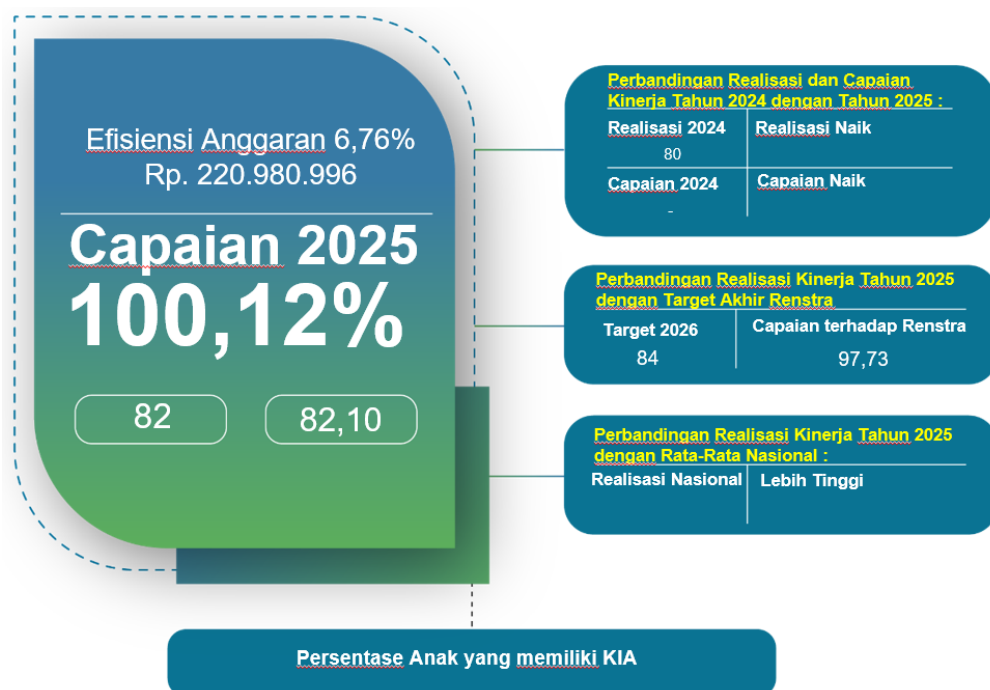
Faktor pendukung tercapainya Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP Adalah adanya pelayanan jemput bola (Jempol Bahagia) dimana Disdukcapil melaksanakan perekaman bagi penduduk rentan dan disabilitas yang mana menunjang

capaian kepemilikan KTP dan juga Perekaman Goes to School serta Layanan Sore Malam (LSM) yang mana meningkatkan persentase kepemilikan dokumen E-KTP karena Disducapil melaksanakan jemput bola perekaman sehingga Masyarakat yang mencapai umur 17 tahun hanya tinggal mengambil dokumen KTP.

Program yang mendukung pencapaian nilai sakiap yaitu program Pendaftaran Penduduk.

Efisiensi indikator kinerja utama (IKU) diatas mencapai 6.76% atau setara dengan Rp. 220.980.996 yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.270.368.700, terealisasi sebesar Rp. 3.049.387.704.

Bagan Capaian Sasaran 7



Persentase Anak yang memiliki KIA digunakan untuk mengukur tingkat cakupan kepemilikan identitas kependudukan pada anak usia 0–17 tahun dalam suatu wilayah. Persentase Anak yang memiliki KIA diukur dan dipublikasikan oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dalam laporan DKB per semester. Pada tahun 2025, realisasi Persentase Anak yang memiliki KIA mencapai 82.10% dari target yang ditetapkan sebesar 82% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100.12 %.

Ketercapaian tersebut berdasarkan rumus $\frac{\sum \text{Jumlah Anak yang memiliki KIA}}{\sum \text{Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 hari}} \times 100\%$ yang mana berdasarkan data

DKB diperoleh angka **258.627** dengan jumlah anak wajib KIA **315.001** sehingga capaian **82.10%**.

Pada aspek realisasi, Persentase Anak yang memiliki KIA dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena indikator Persentase Anak yang memiliki KIA belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode Renstra Tahun 2019–2024.

Persentase Anak yang memiliki KIA tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2019–2024 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun 2025–2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 sebesar 84% sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga diperoleh capaian sebesar 97.73% .

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator Persentase Anak yang memiliki KIA tetap digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2025–2026 dengan target sebesar 100% Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut mencapai 97.73%.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi Persentase Anak yang memiliki KIA perbandingan dengan nilai provinsi dan Nasional tidak dapat dianalisis karena perbedaan indikator yang diampu.

Faktor pendukung tercapainya Persentase Anak yang memiliki KIA Adalah adanya Komitmen pimpinan dan dukungan kebijakan daerah, Kerja sama lintas sektor, Pelayanan terintegrasi untuk bayi baru lahir yaitu Kerjasama 3 in 1 dengan Rumah Sakit, Bidan, ataupun sekolah-sekolah terkait dengan layanan KIA serta pemanfaatan teknologi digital Dimana Masyarakat dapat mengajukan KIA melalui aplikasi Pakuan Prima.

Program yang mendukung pencapaian nilai saki yaitu program Pendaftaran Penduduk.

Efisiensi indikator kinerja utama (IKU) diatas mencapai 6.76% atau setara dengan Rp. 220.980.996 yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.270.368.700, terealisasi sebesar Rp. 3.049.387.704.

Bagan Capaian Sasaran 8



Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 Tahun digunakan untuk mengukur tingkat cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak sebagai identitas hukum yang sah. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 Tahun diukur dan dipublikasikan oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dalam laporan DKB per semester. Pada tahun 2025, realisasi Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 Tahun mencapai 99.20% dari target yang ditetapkan sebesar 99.20% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100 %.

Ketercapaian tersebut berdasarkan rumus $\frac{\sum \text{Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran}}{\sum \text{Jumlah Keseluruhan Anak Usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$ yang mana berdasarkan data DKB diperoleh angka **330.620** dengan jumlah anak usia 0-18 Tahun **333.219** sehingga capaian **99.20%**.

Pada aspek realisasi, Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 Tahun dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena indikator Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 Tahun belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode Renstra Tahun 2019–2024.

Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 Tahun tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2019–2024 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun 2025–2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 sebesar 99.50% sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga diperoleh capaian sebesar 99.71% .

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 Tahun tetap digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2025–2026 dengan target sebesar 99.50% Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut mencapai 99.71%

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 Tahun perbandingan dengan nilai provinsi dan Nasional tidak dapat dianalisis karena perbedaan indikator yang diampu.

Faktor pendukung tercapainya Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 Tahun Adalah adanya Komitmen pimpinan dan dukungan kebijakan daerah, Kerja sama lintas sektor, Pelayanan terintegrasi untuk bayi baru lahir yaitu Kerjasama 3 in 1 dengan Rumah Sakit, Bidan, ataupun sekolah-sekolah terkait dengan layanan Akta Kelahiran serta pemanfaatan teknologi digital Dimana Masyarakat dapat mengajukan Akta Kelahiran melalui aplikasi Pakuan Prima.

Program yang mendukung pencapaian nilai saki yaitu program Pencatatan Sipil.

Efisiensi indikator kinerja utama (IKU) diatas mencapai 2.92% atau setara dengan Rp. 4.117.348 yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp. 140.889.600, terealisasi sebesar Rp. 136.772.252.

Bagan Capaian Sasaran 9



Persentase Pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatan sipil digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan data kependudukan oleh instansi/stakeholder dalam mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik. Persentase Pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatan sipil diukur dan dipublikasikan oleh Dukcapil Kota Bogor. Pada tahun 2025, realisasi Persentase Pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatan sipil mencapai 69.44% dari target yang ditetapkan sebesar 69.44% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100 %.

Adapun rumus perhitungan Persentase pemanfaatan data agregat Adalah $\frac{\sum \text{Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan}}{\sum \text{Jumlah Perangkat daerah di Kota Bogor}} \times 100\%$ Dimana pada tahun 2025 berdasarkan dokumen Kerjasama yang dilakukan antara Disdukcapil dengan instansi lain diperoleh data bahwa terdapat 25 OPD yang melaksanakan Kerjasama dari 36 OPD sehingga diperoleh capaian 69.44%.

Pada aspek realisasi, Persentase Pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatan sipil dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari aspek pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena indikator

Persentase Pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatan sipil belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode Renstra Tahun 2019–2024.

Persentase Pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatan sipil tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2019–2024 dan hanya tercantum dalam Dokumen RPD Tahun 2025–2026. Oleh karena itu, perbandingan terhadap target jangka menengah dilakukan dengan menggunakan target tahun 2026 sebesar 72.22% sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, sehingga diperoleh capaian sebesar 96.15% .

Dalam perbandingan terhadap target jangka menengah, Indikator Persentase Pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatan sipil tetap digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen renstra Tahun 2025–2026 dengan target sebesar 72.22% Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025, capaian terhadap target tersebut mencapai 96.15% Adapun IKU yang tercantum pada Renstra 2025-2029 tidak menjadikan Persentase Pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatan sipil sebagai IKU.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional, realisasi Persentase Pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatan sipil perbandingan dengan nilai provinsi dan Nasional tidak dapat dianalisis karena perbedaan indikator yang diampu.

Faktor pendukung tercapainya Persentase Pemanfaatan Data Agregat Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bogor antara lain sebagai berikut:

1. Ketersediaan database kependudukan yang akurat dan mutakhir
2. Komitmen pemerintah daerah dalam pemanfaatan data kependudukan
3. Kerja sama pemanfaatan data dengan perangkat daerah dan instansi lain
4. Integrasi layanan berbasis NIK
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
6. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan
7. Koordinasi dan sosialisasi kepada stakeholder
8. Peningkatan kesadaran pentingnya data untuk perencanaan Pembangunan
9. Ketersediaan SDM pengelola data yang kompeten

Program yang mendukung pencapaian nilai sakip yaitu program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Efisiensi indikator kinerja utama (IKU) diatas mencapai 4.32% atau setara dengan Rp. 32.888.111 yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp. 761.632.949, terealisasi sebesar Rp. 728.744.831.

Pencapaian target sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis. Secara umum, mayoritas program dan kegiatan pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi, meskipun pada beberapa indikator masih ditemukan capaian yang belum optimal.

Selain faktor perencanaan dan pelaksanaan program, keberhasilan kinerja Disdukcapil Kota Bogor juga didukung oleh komitmen reformasi birokrasi, yang ditandai dengan diraihnya penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Predikat WBK tersebut menjadi penguat dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar serta mendorong terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang transparan, akuntabel, dan seluruhnya dilaksanakan tanpa pungutan biaya.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program strategis yang berperan besar dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pada Tahun 2025, capaian indikator SAKIP menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya mencapai target.

Nilai SAKIP pada aspek Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh masih adanya target kinerja yang belum sepenuhnya *on the track* serta keterkaitan antara indikator, kegiatan, dan output yang perlu terus disempurnakan. Namun demikian, pada aspek Pelaporan Kinerja, capaian justru melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan peningkatan

kualitas penyusunan dan ketepatan waktu pelaporan kinerja perangkat daerah.

Aspek Evaluasi Internal juga menunjukkan capaian yang mendekati target, didukung oleh terlaksananya evaluasi kinerja secara berkala serta penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan. Hal ini diperkuat dengan capaian 100 persen realisasi rencana tindak pengendalian risiko, serta penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan secara tepat waktu.

Namun demikian, pada indikator kepatuhan anggaran, capaian masih berada di bawah target. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya penyesuaian pelaksanaan anggaran serta efisiensi belanja yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap rencana anggaran awal. Meskipun demikian, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target, serta realisasi anggaran terhadap DPA berada pada kategori cukup baik.

Pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah secara umum berjalan optimal, ditunjukkan dengan tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu serta tercapainya realisasi fisik kegiatan sebesar 100 persen. Kegiatan Administrasi Keuangan juga berhasil menjamin pemenuhan gaji dan tunjangan ASN secara penuh, meskipun terdapat selisih jumlah penerima akibat mutasi dan perubahan status kepegawaian.

Kegiatan administrasi umum dan pengadaan sarana prasarana secara signifikan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini tercermin dari capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada aspek sarana prasarana dan kualitas SDM yang melampaui target. Seluruh sub kegiatan pendukung, seperti penyediaan peralatan kantor, bahan logistik, barang cetakan, rapat koordinasi, serta fasilitasi kunjungan tamu, terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah juga menunjukkan capaian optimal, dengan seluruh sarana dan prasarana penunjang pelayanan berada dalam kondisi baik dan layak operasional. Kondisi ini berkontribusi positif terhadap kelancaran pelayanan

administrasi kependudukan kepada masyarakat hanya dibutuhkan sarana pemeliharaan secara berkala.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor membutuhkan pengadaan Barang computer, Printer dan Scanner guna mendukung Command center dalam satu data kependudukan dan Inovasi Loker Beres “ Layanan Online Kependudukan Kelurahan Berintegrasi, Efektif, Responsif, Rfisien, Sederhana)yaitu Strategi Peningkatan kualitas Pelayanan Adminduk Menuju Kota Bogor Beres. Program ini berfokus pada transformasi digital Pelayanan Adminduk dengan memperluas akses layanan hingga ke tingkat kelurahan. Implementasi dimulai dengan enam kelurahan percontohan yaitu Mulyaharja (Bogor Selatan). Baranangsian (Bogor Timur), Tegallega (Bogor Tengah), Sindangbarang (Bogor Barat), Tegalgundil (Bogor Utara) dan Mekarwangi (Tanah Sareal) sehingga membutuhkan fasilitasi Sarana dan Prasarana kebutuhan Komputer, printer dan Scanner yang terbagi kedalam 68 kelurahan dan teranggarkan di Disdukcapil Kota Bogor.

II. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Program Pendaftaran Penduduk memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pada Tahun 2025, persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga dan cakupan perekaman KTP-el berhasil mencapai target 100 persen. Pelayanan pendaftaran penduduk juga menunjukkan peningkatan kualitas, tercermin dari persentase dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan sesuai SOP yang melampaui target.

Pelaksanaan sub kegiatan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan dapat dilaksanakan sesuai rencana, sehingga mendukung pemutakhiran database kependudukan Kota Bogor.

III. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Program Pencatatan Sipil mendukung peningkatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil, khususnya akta kelahiran dan akta

perkawinan. Pada Tahun 2025, persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0–18 tahun menunjukkan capaian yang sangat baik dan mendekati target. Persentase rumah tangga yang memiliki akta perkawinan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih memerlukan upaya lanjutan melalui sosialisasi dan fasilitasi pencatatan sipil.

Seluruh kegiatan dan sub kegiatan pencatatan sipil dapat dilaksanakan sesuai rencana, dengan penerbitan dokumen peristiwa penting dan fasilitasi pencatatan sipil yang berjalan optimal.

IV. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berperan penting dalam mendukung sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi kependudukan. Pada Tahun 2025, Disdukcapil Kota Bogor telah menyediakan, mengolah, menyajikan, dan memutakhirkan secara berkala 10 jenis data administrasi kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diantaranya :

1. Data Penduduk WNI
2. Data Penduduk WNA
3. Data Kartu Keluarga (KK)
4. Data Nomor Induk Kependudukan (NIK)
5. Data Kepemilikan KTP Elektronik (KTP-el)
6. Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
7. Data Kepemilikan Akta Kelahiran
8. Data Kepemilikan Akta Kematian
9. Data Perpindahan Penduduk (Pindah Datang)
10. Data Agregat Kependudukan Kota Bogor

Kegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan, inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah, serta penyelenggaraan pengelolaan informasi adminduk dapat dilaksanakan sesuai target. Selain itu, data kependudukan telah dimanfaatkan oleh 24 institusi dan pemangku kepentingan, yang menunjukkan meningkatnya

peran data adminduk dalam mendukung pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

No	Perangkat Daerah	Tujuan	Elemen Data	Keterangan
1	Dinas Kesehatan Kota Bogor	Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jamkesda dan Nomor Kepesertaan Jamkesda	Nomor/ Keterangan Penerima bantuan iuran Jamkesda dan Nomor Kepesertaan Jamkesda	
2	DPMPTSP Kota Bogor	Verifikasi dan Validasi Data pemohon layanan perizinan	Nomor Perizinan dan Jenis Perizinan	OPD tidak Mengajukan Perpanjangan
3	DISKOMINFO Kota Bogor	Verifikasi dan Validasi Data pemohon layanan Pengaduan	No ID Layanan Aduan dan Jenis Aduan	OPD tidak Mengajukan Perpanjangan
4	BAPENDA Kota Bogor	Verifikasi dan Validasi Data Wajib Pajak Daerah	Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak dan Jenis Objek Pajak	
5	Dinas Sosial Kota Bogor	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Nomor Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	OPD tidak Mengajukan Perpanjangan
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi dan Validasi Data pemohon layanan pengaduan dan penerima bantuan serta pelatihan	No ID Layanan Aduan dan Jenis Aduan, No ID Penerima Bantuan dan Jenis Bantuan, No. ID Peserta Pelatihan dan	

			Jenis Pelatihan	
7	Kecamatan Bogor Utara	Verifikasi dan Validasi Data pemohon layanan Administrasi	Nomor Registrasi Layanan dan Jenis Layanan	
8	Kecamatan Bogor Selatan	Verifikasi dan Validasi Data Layanan Administrasi	Nomor Registrasi Layanan dan Jenis Layanan	
9	Kecamatan Tanah Sareal	Verifikasi dan Validasi Data Layanan Administrasi	Nomor Registrasi Layanan dan Jenis Layanan	OPD tidak Mengajukan Perpanjangan
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi dan Validasi data pemohon	Nomor Perizinan Organisasi Masyarakat dan Nama Organisasi Masyarakat	OPD tidak Mengajukan Perpanjangan
11	Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor	Verifikasi dan Validasi data Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Nomor Keterangan penerima bantuan rumah Tidak Layak Huni	OPD tidak Mengajukan Perpanjangan
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	Verifikasi dan Validasi data Korban Bencana Daerah	Keterangan Korban Bencana Daerah	
13	Kecamatan Bogor Barat	Verifikasi dan Validasi Data Layanan Administrasi	Nomor Registrasi Layanan dan Jenis Layanan	
14	Kecamatan Bogor Tengah	Verifikasi dan Validasi Data Layanan Administrasi	Nomor Registrasi Layanan dan Jenis Layanan	
15	Kecamatan Bogor Timur	Verifikasi dan Validasi Data	Nomor Registrasi	

		Layanan Administrasi	Layanan dan Jenis Layanan	
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor	Verifikasi dan Validasi Data Peserta Program Keluarga Berencana	Keterangan peserta program keluarga berencana dan jenis alat kontrasepsi yang digunakan	
17	Dinas Pendidikan	Verifikasi dan Validasi Data calon siswa, Guru, dan Tenaga Pendidik	Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nama Sekolah, Alamat Sekolah, Nomor Izasah, Nomor Surat Keterangan Pengganti Izasah, Prestasi Siswa, Nomor Unik Pendidik, Nomor Unik Tenaga Kependidikan	
18	RSUD Kota Bogor	Verifikasi dan Validasi Data Calon Pasien dan Pasien	Nomor Rekam Medis, Golongan Darah, Nomor Surat Keterangan Kelahiran dan Nomor Surat Keterangan Kematian	OPD tidak Mengajukan Perpanjangan
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor	Verifikasi dan Validasi Data Anggota Perpustakaan Daerah	Nomor Anggota Perpustakaan Daerah	

20	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	Verifikasi dan Validasi Data pelaku pelanggaran peraturan daerah	Nomor/ Keterangan pelaku pelanggaran daerah dan jenis pelanggaran	
21	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	Verifikasi dan Validasi Data Calon Pekerja dan Pekerja	Nomor Data Calon Pekerja dan Pekerja	
22	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor	Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima bantuan dan penerima bantuan pemerintah bidang pemuda dan olahraga	Nomor calon penerima bantuan dan penerima bantuan pemerintah bidang pemuda dan olahraga	
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima bantuan dan penerima bantuan pemerintah bidang Pertanian	Nomor calon penerima bantuan dan penerima bantuan pemerintah bidang Pertanian	
24	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor	Verifikasi dan Validasi Data warga yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran	Nomor Warga yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran	

Sumber :

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

3.1. Realisasi Anggaran

Didalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa pengukuran kinerja merupakan elemen penting akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang juga harus dibarengi dengan akuntabilitas keuangan. Pencapaian target kinerja organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh penganggaran harus diinformasikan dengan jelas guna kepentingan penganggaran dimasa mendatang. Pencapaian Sasaran tahun 2025 mengalami beberapa pergeseran dan penambahan dalam perubahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.796.174.266,-. Pagu anggaran dan realisasi belanja Disdukcapil Kota Bogor setelah Perubahan Anggaran Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Ralisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu setelah Pereubahan	Ralisasi s.d Desember 2025	Sisa Pagu	Persen tase1
	URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
I	PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.623.283.024	14.810.608.700	812.674.324	94.79 %
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.816.500	112.946.300	870.200	99,24 %
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.816.500	112.946.300	870.200	99,24 %
	Kegiatan :				

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.762.091.874	10.063.291.706	698.800.168	93,47 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.704.349.074	10.005.548.906	698.800.168	93,47%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	57.742.80	57.742.800	0	100%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	536.632.600	414.671.789	21.960.811	95.91%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.388.300	17.145.200	243.100	98.60%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.784.500	36.269.400	4.515.100	88.93%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190.232.400	187.672.875	2.559.525	98.66%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.289.400	16.879.900	409.500	97.63%
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	148.215.200	134.310.000	13.905.200	74.24%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.722.800	122.394.414	328.386	99.74%
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.071.216.500	2.012.268.983	58.947.517	97.15%

	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.071.216.500	2.012.268.983	58.947.517	97.15%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.590.808.256	1.562.023.274	28.784.982	98.19%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	276.131.528	248.117.150	28.014.378	89.85%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.314.676.728	1.313.906.124	770.604	99.94%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	548.717.294	545.406.648	3.310.646	99.40%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.973.325	177.513.001	1.460.324	99.18%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	234.010.000	233.858.647	151.353	99.94%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	135.733.969	134.035.000	1.698.969	98.75%
II	PROGRAM : Pendaftaran Penduduk	3.270.368.700	3.049.387.704	220.980.996	93,24%
	Kegiatan: Pelayanan Pendaftaran Penduduk	110.631.700	93.050.000	17.581.700	84,11%
	Sub Kegiatan :				

	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	110.631.700	93.050.000	17.581.700	84,11%
	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	0	0	0	0
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	3.159.737.000	2.956.337.704	203.399.296	93,56%
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	3.159.737.000	2.956.337.704	203.399.296	93,56%
3	PROGRAM : Pencatatan Sipil	140.889.600	136.772.252	4.117.348	97,08%
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	60.562.000	56.635.000	3.927.000	93,52%
	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	60.562.000	56.635.000	3.927.000	93,52%
	Sub Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	0	0	0	0
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	80.327.600	80.137.252	190.348	99,76%
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipi	80.327.600	80.137.252	190.348	99,76%
4	PROGRAM :				

	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	761.632.949	728.744.831	32.888.111	95,68%
	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	694.083.000	661.821.259	32.261.741	95,35%
	Sub Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	62.527.300	62.488.700	38.600	99,94%
	Sub Kegiatan : Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	631.555.700	599.332.559	32.223.141	94,90%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	67.549.942	66.923.572	626.370	99,07%
	Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku Kepentingan dan Masyarakat	67.549.942	66.923.572	626.370	99,07%
JUMLAH		19.796.174.266	18.725.513.487	1.070.660.779	94,59%

B_{AB} IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintahan. LKIP ini menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2025.

Secara umum, kinerja perangkat daerah pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Dimana terdapat 6 (enam) IKU yang mana semuanya telah tercapai. Seluruh indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan meningkatnya efektivitas perencanaan, pelaksanaan program, serta pengukuran dan pelaporan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan, antara lain optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan koordinasi dan inovasi. Berbagai kendala dan tantangan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang, tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Perencanaan dan Indikator Kinerja

Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan menyempurnakan indikator yang lebih terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil serta selaras dengan dokumen perencanaan daerah.

2. **Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih efektif dan efisien serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3. **Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja**

Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai dasar perbaikan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelaporan kinerja yang akurat dan tepat waktu.

4. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola**

Mendorong peningkatan kompetensi aparatur serta penguatan tata kelola organisasi guna mendukung terciptanya kinerja yang profesional dan berintegritas.

5. **Penguatan Akuntabilitas dan Budaya Kinerja**

Meningkatkan komitmen seluruh jajaran dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan dilaksanakannya tindak lanjut tersebut, diharapkan kinerja perangkat daerah pada tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat dan memberikan kontribusi optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

4.3. Penghargaan Inovasi dan Predikat yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor telah Banyak mendapatkan penghargaan baik dalam kota maupun tingkat Provinsi diantaranya Bogor Inovation Award dan Adminduk Juara yang merupakan penghargaan tingkat provinsi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor juga telah mendapatkan penghargaan predikat Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), Ombusman dan PEKPP. Penghargaan ini diperoleh Disdukcapil Kota Bogor telah menunjang

sasaran ketiga yaitu pada indicator presentase penduduk yang terlayani yang dianggap pelayanan Prima.

Sebagaimana terlampir dokumentasi penghargaan yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, sebagai berikut :

1	Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2023 (ZI- WBK) dari KEMENPAN- RI	
2	Juara 2 Adminduk Prima Tahun 2025	

3	Penghargaan Ombusman RI terhadap Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023	
4	Penghargaan Ombusman RI terhadap Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024	

5	Penghargaan BIA	
		

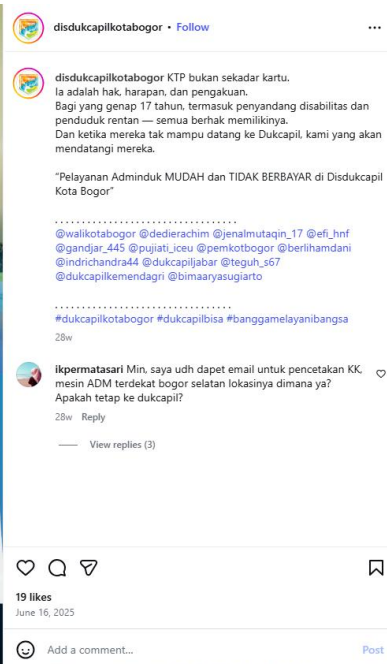
6	Bogor Inovation Award 2024 Inovasi Laksa Pedas dan Lapis Bogor	

DOKUMENTASI KEGIATAN DISDUKCAPIL KOTA BOGOR

TAHUN 2025

1. KEGIATAN PEMDUKUNG JANJI POLITIK (JEMPUT BOLA)

1.1. Jempol Bahagia





disdukcapilkotabogor • Follow
Connie Francis • Pretty Little Baby



disdukcapilkotabogor Inovasi hadir sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Jempol Bahagia bukan inovasi sesaat, namun akan selalu hadir untuk penduduk rentan yang memerlukan KTP Elektronik sebagai bentuk pengakuan negara terhadap warganya.

"Pelayanan Adminkud MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
@denny_dppkad @gandjar_445 @pemkotbogor @berlihamdani
@indrichandra44 @dukcapiljabar @teguh_s67
@dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapilibisa #banggamelayanibangsa

aa_syamz Hari sabtu tetap buka sekarang ?

24w Reply

kristina.indahdpgma Sehat selalu tim jempol bahagia, semangat terus melayani

24w Reply



ptriindahhh Min mau tanya, kalau mau ganti KTP yg rusak bisa di wakilin ngga ya?

24w Reply



39 likes



July 14, 2025



Add a comment...

Post



We said :
"Ada lansia, orang sakit, ODGJ dan disabilitas yang butuh KTP tapi tidak bisa datang ke Dukcapil"



disdukcapilkotabogor • Follow
DJ Shadow • Six Days (feat. Mos Def) [Remix]



disdukcapilkotabogor Jangan salah sangka lagi yaa ✨

Layanan Perekam KTP di tempat ditujukan untuk memfasilitas penduduk rentan adminkud yang belum memiliki KTP Elektronik, yaitu

1. Orang lanjut usia dan orang sakit berat sehingga tidak dapat datang ke kantor dukcapil;
 2. Disabilitas; dan
 3. ODGJ.
- Kepemilikan KTP penting karena merupakan identitas resmi seorang warga negara dan menjadi dasar untuk mendapatkan layanan publik lainnya seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dll.

Jika ada keluarga, saudara atau tetangga yang termasuk penduduk rentan dan belum memiliki KTP, bisa mengajukan perekaman KTP di tempat dengan persyaratan :

1. Surat pengantar Kelurahan
2. Fotokopi KK
3. Foto/video kondisi penduduk
4. Surat pengantar RT RW (jika belum memiliki KK)

"Pelayanan Adminkud MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17 @efi_hnf
@gandjar_445 @pujiati_iceu @pemkotbogor @berlihamdani
@indrichandra44 @dukcapiljabar @teguh_s67
@dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapilibisa #banggamelayanibangsa



71 likes



June 25, 2025



Add a comment...

Post



disdukcapilkotabogor • Follow
Original audio

disdukcapilkotabogor Dukcapil Mentality 🧠

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

.....

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17 @efi_hnf
@gandjar_445 @pujiati_iceu @pemkotbogor @berlihamdani
@indrichandra44 @dukcapiljabar @teguh_s67
@dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

.....

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

29w

tashaaljoefry @disdukcapilkotabogor mhn infokan buat KTP untuk anak berkebutuhan khusus apa sama sprti yg lain? ❤️

29w Reply

— View replies (1)

fikrimonok Ker jangar hulu digerebek kulobaan 🤔 ❤️

29w 3 likes Reply

— View replies (1)

mr.deltazulu 🙏🙏🙏 ❤️

29w Reply

— View replies (1)

198 likes
June 7, 2025

Add a comment... Post

1.2. Go To School



disdukcapilkotabogor • Follow
onve • Good Luck, Babe!

disdukcapilkotabogor Dukcapil Kota Bogor Goes to SMA Pesat 🏫

Kegiatan perekaman KTP Elektronik bagi pelajar di SMA Pesat yang sudah berusia 16 tahun ke atas.

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

.....

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
@denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445
@pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar
@teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

.....

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

4w

23 likes
December 3, 2025

Add a comment... Post





disdukcapilkotabogor • Follow

Rizky Febian, Adrian Khalif • Alamak



disdukcapilkotabogor

Dukcapil Goes to School : SMAN 8 Kota Bogor ✨

Layanan perekaman KTP Elektronik bagi pelajar yang langsung diadakan di sekolah, jadi memudahkan siswa/i tanpa perlu meninggalkan pembelajaran di sekolah 📖

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17

@denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445

@pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar

@teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

6w



lucysid_Min, nanya.. ktp hilang persyaratannya apa ya?

6w Reply

View replies (1)



saperayi Emang iya twes?@yapstarraaa

5w Reply See translation



semoganyelipsejuta 95% isi video ini orang2 dari kelas kita @dviheelcyon 🤔🤔🤔🤔🤔

6w 2 likes Reply





67 likes

November 20, 2025



Add a comment...

Post

75



disdukcapi kotabogor and sman2.kotabogor
PinkPantheress • Illegal

disdukcapi kotabogor Dukcapil Goes to School : SMAN 2 Kota Bogor 🇮🇩

"Pelayanan Adminkuk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapi Kota Bogor"

.....

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
@denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445
@pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar
@teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

.....

#dukcapikotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

6w

dedenurulfazriah Min... pemohon KTP yg kemarin hari udah bisa di ambil ???

6w Reply

— View replies (8)

mas_ghind Semangat anak smanda 2bogor

5w Reply

227 likes
November 18, 2025

Add a comment... Post



disdukcapi kotabogor • Follow
Original audio

disdukcapi kotabogor Dukcapil Kota Bogor Goes to MA Negeri 2 Kota Bogor 🇮🇩

"Pelayanan Adminkuk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapi Kota Bogor"

.....

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
@denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445
@pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar
@teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

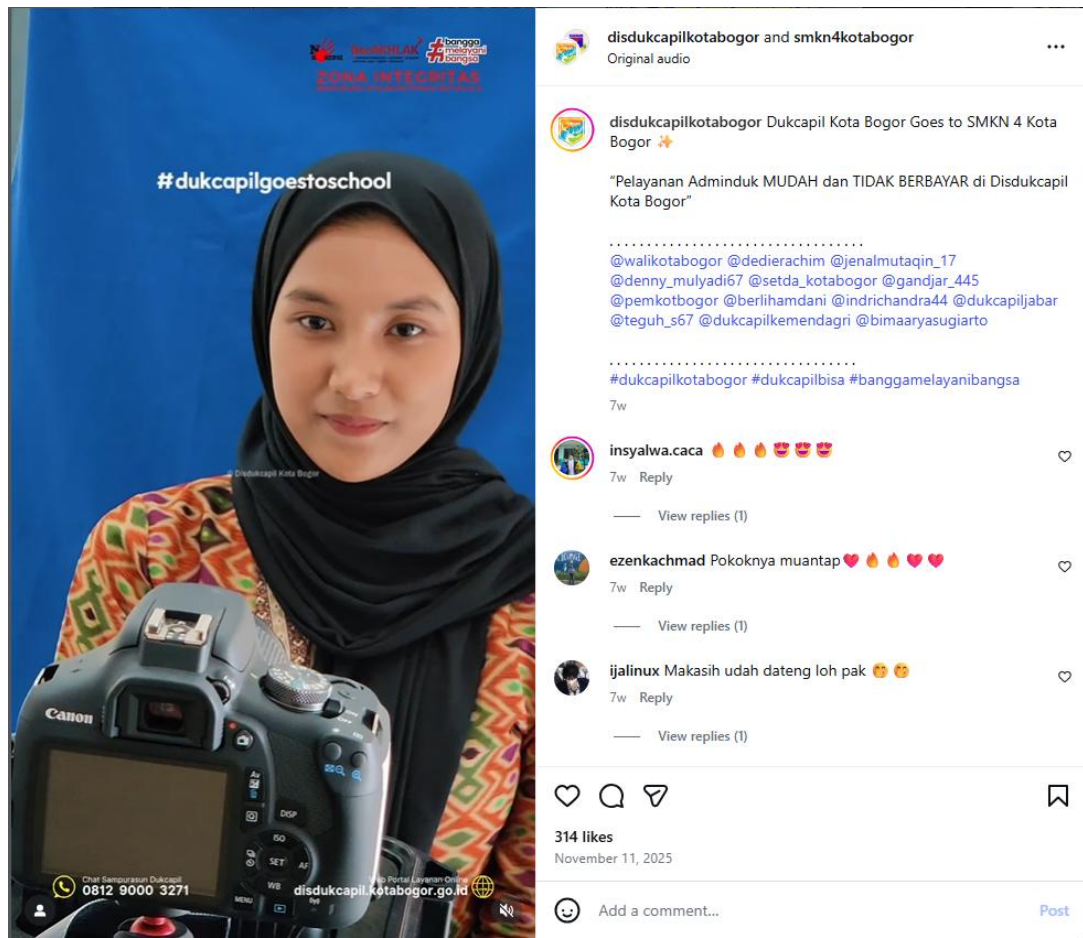
.....

#dukcapikotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

7w

70 likes
November 13, 2025

Add a comment... Post



1.3. LSM



disdukcapilkotabogor • Follow
Original audio



disdukcapilkotabogor Layanan Sore Malam (LSM) Dukcapil : Edisi Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan 🌟
"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
@denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445
@pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar
@teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa
8w



23 likes
November 7, 2025

Add a comment...



Post



disdukcapilkotabogor • Follow
Taylor Swift • ...Ready For It?



disdukcapilkotabogor Layanan Sore Malam (LSM) Dukcapil di Kelurahan Kebon Kelapa dan Kelurahan Panaragan 🌟
"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
@denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445
@pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar
@teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa
5w



12 likes
November 26, 2025

Add a comment...



Post



disdukcapilkotabogor • Follow
Matthew Hall • Home

disdukcapilkotabogor #latepost Layanan Sore Malam (LSM) Dukcapil di Kelurahan Pamoyanan dan Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan pada Kamis, 27 November 2025 🌟

"Pelayanan Adminder MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

.....
 @walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
 @denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445
 @pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar
 @teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

.....
 #dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

4w

This reel has 1 comment from Facebook.

16 likes
December 5, 2025

Add a comment... Post



disdukcapilkotabogor • Follow
Original audio

disdukcapilkotabogor #latepost Layanan Sore Malam (LSM) Dukcapil di Kelurahan Cibuluh Kecamatan Bogor Utara 🌟

"Pelayanan Adminder MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

.....
 @walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
 @denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445
 @pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar
 @teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

.....
 #dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

4w

18 likes
December 4, 2025

Add a comment... Post



disdukcapilkotabogor • Follow
Original audio



disdukcapilkotabogor #latepost Layanan Sore Malam (LSM) Dukcapil di Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan dan Kelurahan Tajur Kecamatan Bogor Timur 🌟

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
@denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445
@pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar
@teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa
3w



inesswong Saya ingin mengungkapkan kekecewaan, saya hendak mendaftarkan perkawinan saya yang terjadi di luar negeri, dokumen semua sudah saya lengkapi, bahkan yang tidak di minta pun saya sediakan untuk pelengkap, saya butuh tanda bukti lapor nya, namun sampai detik ini saya tidak dapatkan surat itu, padahal saya butuh, chat saya juga tidak di balas sudah berhari2, begini banget jadi warga Indonesia, mau urus gini aja susah dan di bikin rumit.

3w Reply

View replies (2)



18 likes
December 9, 2025

Add a comment...

Post



disdukcapilkotabogor • Follow
Original audio

disdukcapilkotabogor Layanan Sore Malam (LSM) Dukcapil di Kelurahan Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan 🌟

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

.....

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
 @denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445
 @pemkotbogor @berliamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar
 @teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

.....

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

2w

9 likes
December 12, 2025

Add a comment... Post

1.4. Lapak Capil



disdukcapilkotabogor • Follow
Original audio

disdukcapilkotabogor LAPAK CAPIL : KELURAHAN BARANANGSIANG!

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

.....
 @walikotabogor @heryagisantasari @efi_hnf @gandjar_445
 @pemkotbogor @berliamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar
 @teguh_setyabudi @dukcapilkemendagri @bimaaryasuglarto

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

45w

37 likes
February 15, 2025

Add a comment... Post

LAYANAN PENUHI AKTA PENCATATAN SIPIL

LAPAK CAPIL

AKTA KELAHIRAN USIA 0-18 TAHUN

20 Rabu, 2 Juli 2025

Pukul 09.00 - 12.00 WIB

GRATIS !!!

Kantor Kelurahan Kayumanis
Kecamatan Tanah Sereal

Manfaat Akta Kelahiran

- ✓ Identitas Resmi
- ✓ Pendaftaran Sekolah
- ✓ Akses Layanan Publik
- ✓ Dasar Hak Waris
- ✓ Menikah Secara Sah
- ✓ Perlindungan Hukum
- ✓ Pembuatan KTP & Paspor
- ✓ Dasar Dokumen Lainnya (Ijazah, KIA, NPWP, Rekening Bank, dll)

Persyaratan

- Mengisi Formulir F-2.01
- Surat Keterangan Kelahiran dari RS/Bidan/Kelurahan
- Fotokopi KTP Orang Tua
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Buku Nikah Orang Tua
- Fotokopi KTP 2 Orang Saksi
- Foto Anak (jika Usia > 5 Tahun)

Chat Sampurasan Dukcapil 0812 9000 3271
Web Portal Layanan Online disdukcapil.kotabogor.go.id

LAYANAN PENUHI AKTA PENCATATAN SIPIL

LAPAK CAPIL

AKTA KELAHIRAN USIA 0-18 TAHUN & AKTA KEMATIAN

20 Rabu, 15 Oktober 2025

Pukul 08.30-15.00 WIB

GRATIS !!!

Kantor Kelurahan Kertamaya
Kecamatan Bogor Selatan

Manfaat Akta Kelahiran

- ✓ Identitas Resmi
- ✓ Pendaftaran Sekolah
- ✓ Akses Layanan Publik
- ✓ Dasar Hak Waris
- ✓ Menikah Secara Sah
- ✓ Perlindungan Hukum
- ✓ Pembuatan KTP & Paspor
- ✓ Dasar Dokumen Lainnya (Ijazah, KIA, NPWP, Rekening Bank, dll)

Persyaratan

- Mengisi Formulir F-2.01
- Surat Keterangan Kelahiran dari RS/Bidan/Kelurahan
- Fotokopi KTP Orang Tua
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Buku Nikah Orang Tua
- Fotokopi KTP 2 Orang Saksi

Chat Sampurasan Dukcapil 0812 9000 3271
Web Portal Layanan Online disdukcapil.kotabogor.go.id

1.5. PALU SAKTI



disdukcapilkotabogor • Follow
Jessie J • Price Tag (feat. B.o.B)

disdukcapilkotabogor Palu Sakti Hadir Lagi!
Kali ini Palu Sakti dilaksanakan di Kantor Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor pada tanggal 29 April 2025. Bapak Wali Kota Bogor dan Ketua PN Bogor Kelas 1A turut menyaksikan jalannya persidangan permohonan perubahan nama pada dokumen akta kelahiran. Proses sidang berlangsung sekitar 15 menit dan dokumen kependudukan langsung diberikan kepada pemohon. Semoga dengan adanya Palu Sakti bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Bogor yang memerlukan layanan penetapan PN untuk urusan dokumen kependudukan.

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

.....
@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17 @efi_hnf
@gandjar_445 @pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44
@dukcapiljabar @teguh_s67 @dukcapilkemendagri
@bimaaryasugiarto

.....
#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa
35w

tasyanovani Min mau tanya apakah bisa ganti foto ktp? Kalau bisa mekanismenya bagaimana? Karna ktp sebelumnya saya blm menggunakan hijab 🙏
35w Reply

— View replies (4)

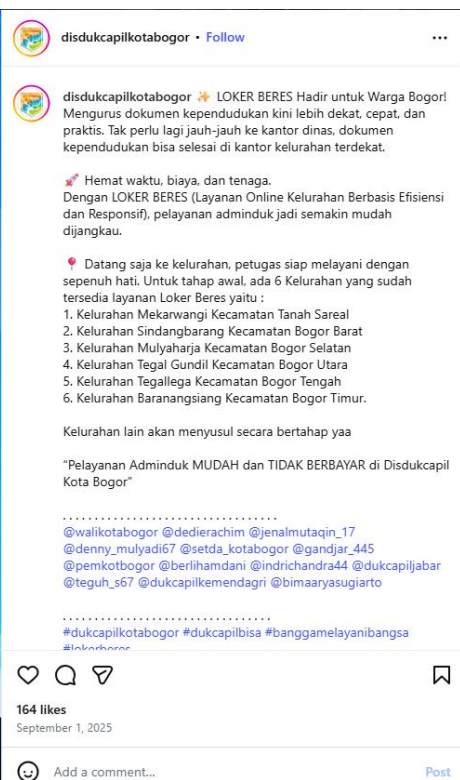
reski_asep Min apa blanko KTP di Bogor selalu habis ya? Soalnya saya buat KTP mengganti status sudah menunggu 6 bulan lamanya blom jadi2 min KTP saya 🙏🙏🙏
34w Reply

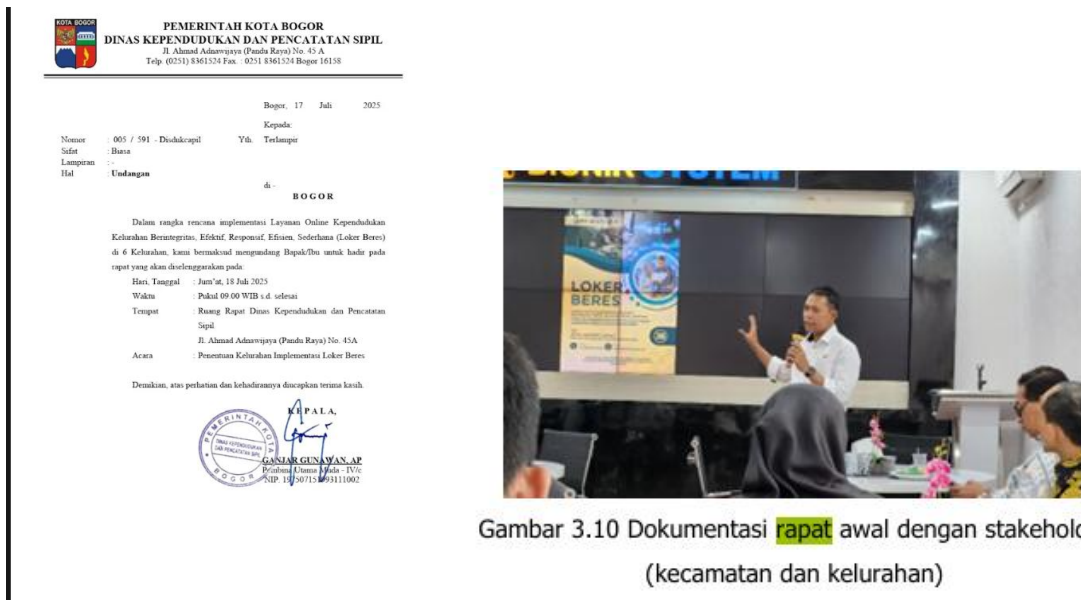
63 likes
April 30, 2025

Add a comment... Post



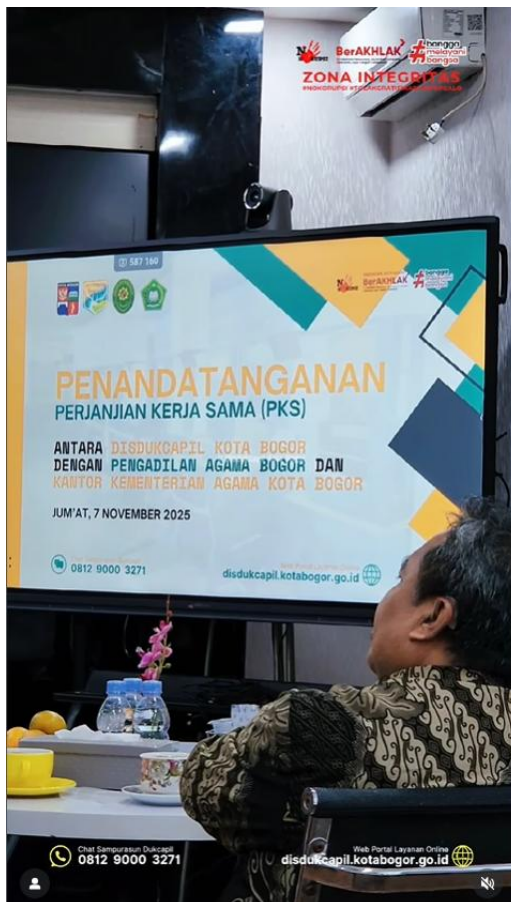
2. KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS WALIKOTA (COMMAND CENTER - LOKER BERES)





Gambar 3.10 Dokumentasi **rapat** awal dengan stakeholder (kecamatan dan kelurahan)

3. INOVASI LAINNYA



disdukcapilkotabogor and 2 others
Rizky Febian, Adrian Khalif • Alamak

disdukcapilkotabogor Kolaborasi dan kerja sama antar lembaga pemerintah menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan. Kami sangat menyambut baik kerja sama yang terjalin antara Disdukcapil Kota Bogor dengan Pengadilan Agama Bogor @pabogor dan Kantor Kementerian Agama Kota Bogor @kemenagkotabogor yang telah ditandatangani oleh pimpinan masing masing instansi pada Jum'at, 7 November 2025.

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
@denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445
@pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar
@teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

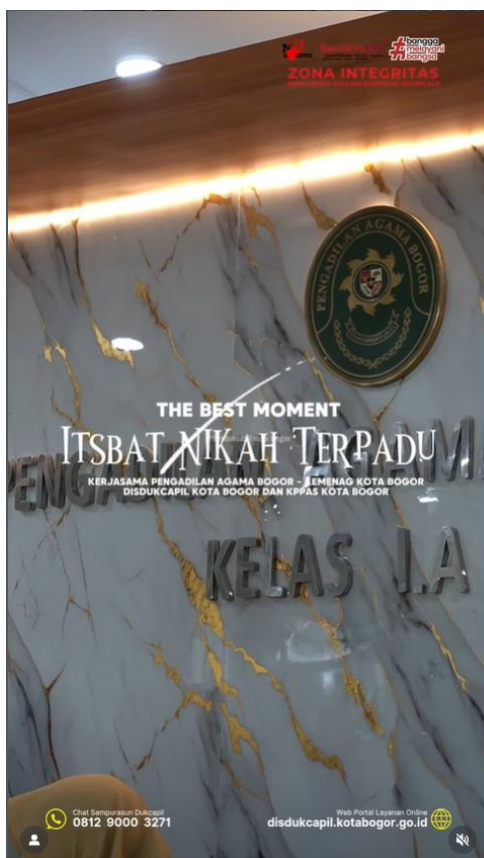
7w



28 likes
November 8, 2025

Add a comment...

Post



disdukcapilkotabogor • Follow
Original audio

disdukcapilkotabogor Kolaborasi mewujudkan tertib adminduk bagi warga Kota Bogor 🌟
Selamat kepada seluruh pasangan suami istri yang telah melaksanakan sidang itsbat nikah yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Bogor @pabogor yang berkolaborasi dengan Kantor Kemenag Kota Bogor @kemenagkotabogor Disdukcapil Kota Bogor dan KPPAS Kota Bogor @kppas.official. Akhirnya sudah bisa ganti status perkawinan dengan KAWIN TERCATAT yaa ❤️

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
@denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445
@pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar
@teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

5w

deliza_ahlinyakonsumsiacara Good 🍷
5w Reply See translation

This reel has 1 comment from Facebook.



16 likes
November 24, 2025

Add a comment...

Post

4. KEGIATAN INOVASI RUTIN LAINNYA

a) Jemput Bola Aktivasi IKD



**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR**

Jl. Achmad Adnanwijaya No. 45A - Kota Bogor

BerAKHLAK
Integritas
Bersama-Sama

3 LANGKAH AKTIVASI

IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

Ibu Wakil

Wakil Kota Bogor

01

Instal Aplikasi "Identitas Kependudukan
Kota Bogor" di Play Store atau Appstore. Tunggu
proses instalasi selesai kemudian buka
aplikasi. Klik **SIKUT** untuk melihat
informasi mengenai IKD atau klik **LEWATI**
untuk langsung ketahap selanjutnya. Klik
SELESAI untuk melanjutkan.

02

Bacalah **Perjanjian Lisensi Pengguna**
ombol ke sebelah kanan kemudian klik **Mendaftar**. Selanjutnya
pilih **Pendaftaran Offline**.

Isi data berupa : **NIK, Nama Lengkap,
Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal
Lahir, Email dan No Telepon.**
Setelah semua data terisi klik **Proses**.
Klik **Selfie**. Setelah itu klik **Pindai**
ke Petugas.

03

disdukcapil.kotabogor.go.id

Klik **Link Aktivasi**

disdukcapilkotabogor • Follow

One Direction • Kiss You

disdukcapilkotabogor Ibu Wakil Wali Kota Bogor sudah punya IKD, kamu kapan?

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
@denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445
@pemkotabogor @berlihamdani @indrichandra44
@dukcapiljabar @teguh_s67 @dukcapikemendagri
@bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapibisa #banggamelayanibangsa

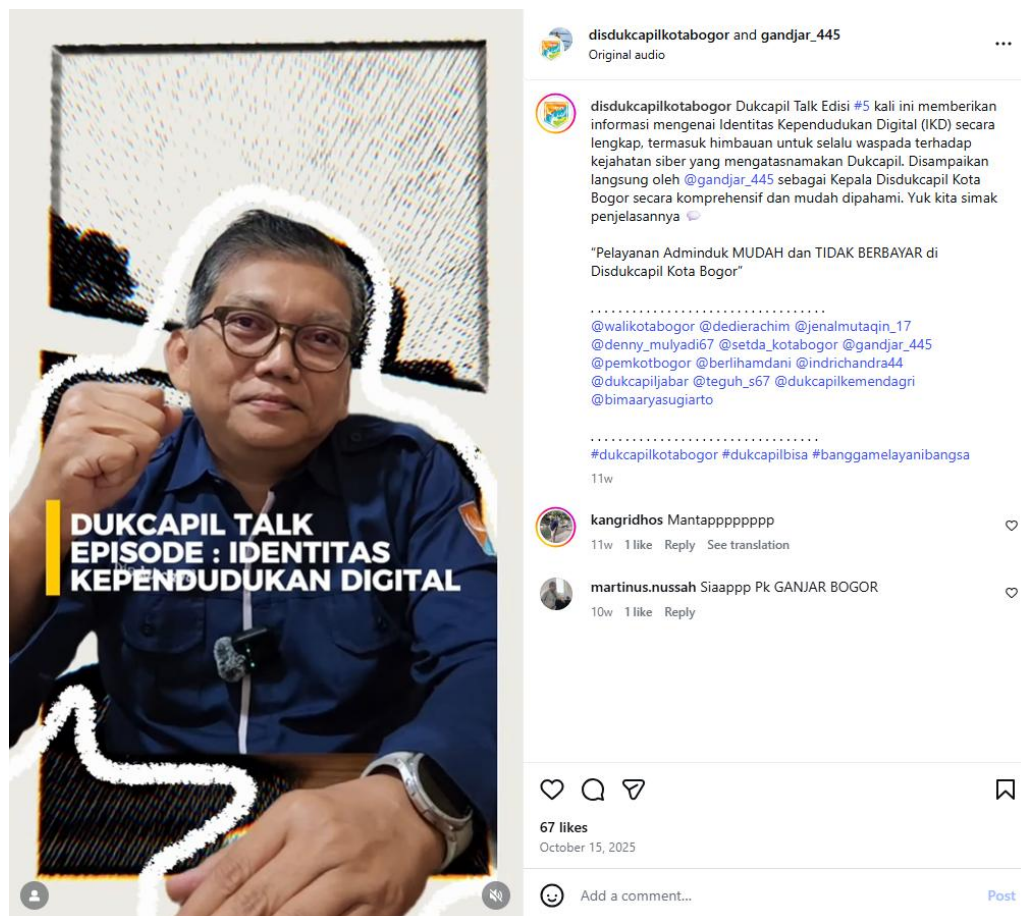
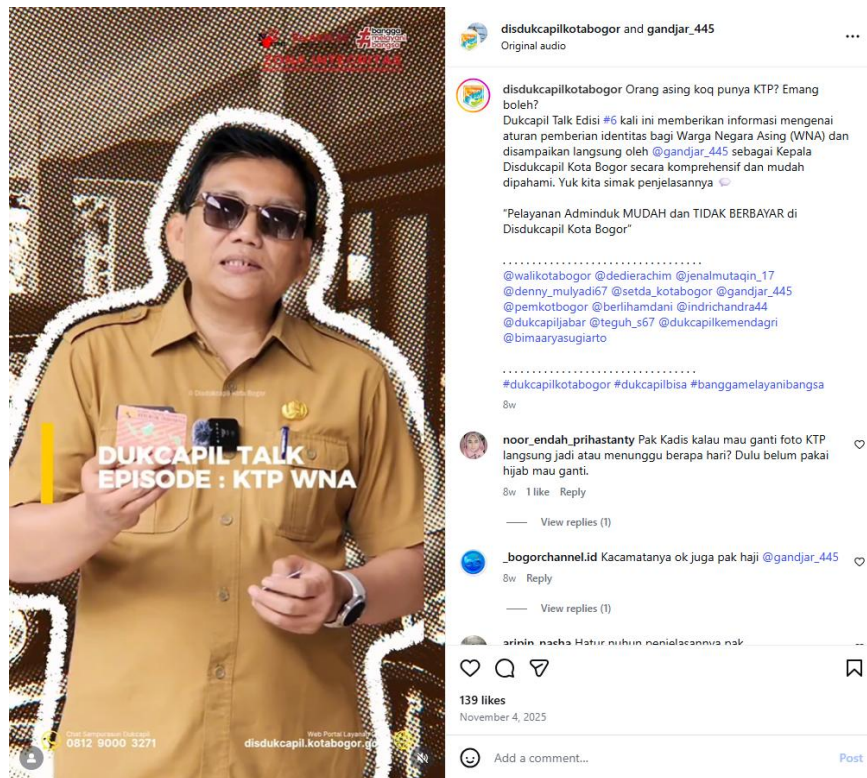
Bw

19 likes

November 7, 2025

Add a comment...

b) Dukcapil Talk



c) Pelayanan Adminduk Di Luar Kantor



disdukcapilkotabogor • Follow
fiikuri • Complete Work



Selamat Hari Kependudukan Dunia!
Dalam peringatan Hari Kependudukan Dunia yang dilaksanakan di Kelurahan Sindang Barang Kecamatan Bogor Barat, Disdukcapil Kota Bogor memberikan pelayanan adminduk berupa pencetakan KIA dan Perekam KTP Elektronik bagi pemula. Adapun hasil layanan pada acara tersebut sebagai berikut :

1. Pencetakan KIA : 65 buah
2. Perekam KTP Pemula : 2 orang

Nantikan layanan Dukcapil di event berikutnya yaa ✨

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
@denny_dppkad @gandjar_445 @pemkotbogor @berlihamdani
@indrichandra44 @dukcapiljabar @teguh_s67
@dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

22w



16 likes
July 31, 2025

Add a comment...



Post

d) Drive Thru



Disukai oleh dedyandanpermana dan lainnya

disdukcapilkotabogor MAGER AMBIL DOKUMEN? PAKAI OJOL AJA!

Dokumen kependudukan yang diajukan lewat Pakuan Prima, bisa didapatkan dengan 2 cara :

1. Unduh/Download file yg dikirim via email (tutorial download dokumen bisa dilihat di Youtube Disdukcapil Kota Bogor :

https://youtu.be/NuiOnXnEr4g?si=KFMCH_i6krcPnfGA) untuk seluruh dokumen kecuali KIA.

2. Diambil sendiri ke drive thru dengan menunjukkan QR Code Pengajuan.

3. Diantar pakai ojol (go-send) dengan pemesanan dari Pemohon dan memberikan QR Code Pengajuan ke driver. Beragam cara pengambilan ini semakin memudahkan warga Kota Bogor dalam memenuhi dokumen kependudukan.

Yuk manfaatkan Pakuan Prima!

Seluruh pelayanan dokumen kependudukan MUDAH dan TIDAK DIPUNGUT BIAYA di Disdukcapil Kota Bogor!

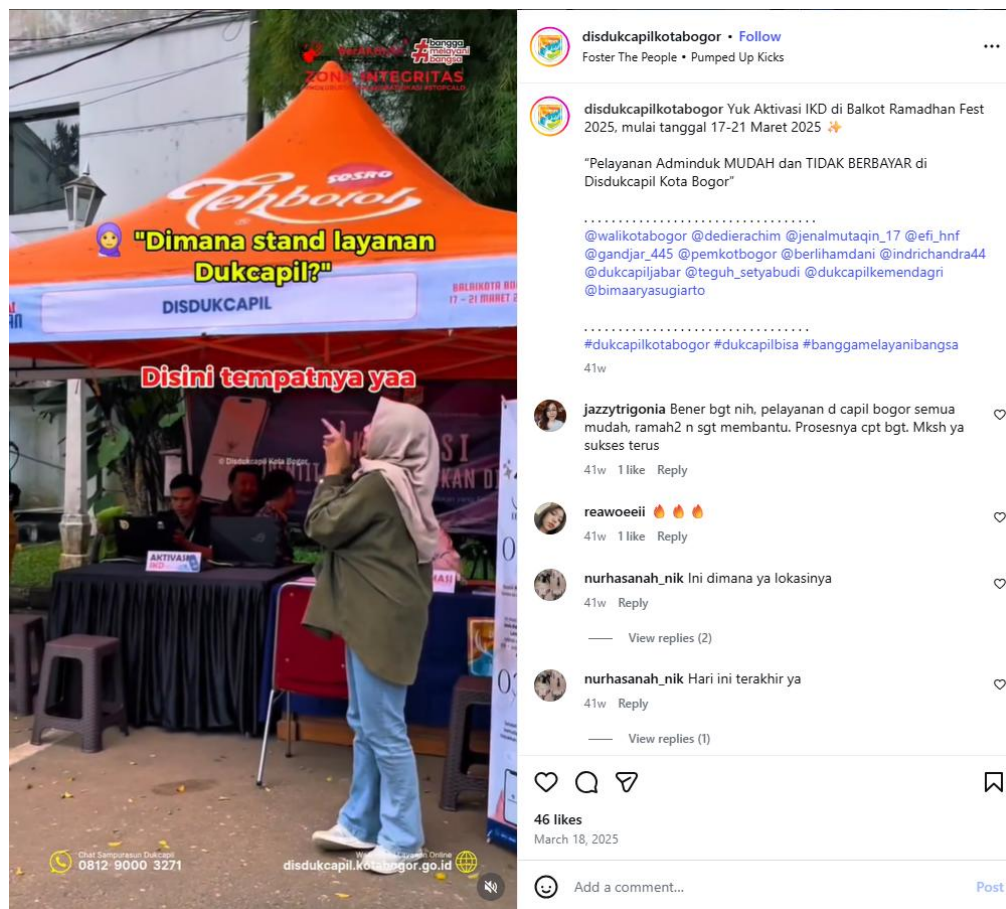
@walikotabogor @heryagisantasari @sofiahsyarifah
@gandjar_445 @pemkotbogor @berlihamdani
@indrichandra44 @dukcapiljabar @teguh_setyabudi
@dukcapilkemendagri

#disdukcapilkotabogor #dukcapilbisa #bogorberlari
#banggamelayanibangsa #pakuanprima

Lihat semua komentar

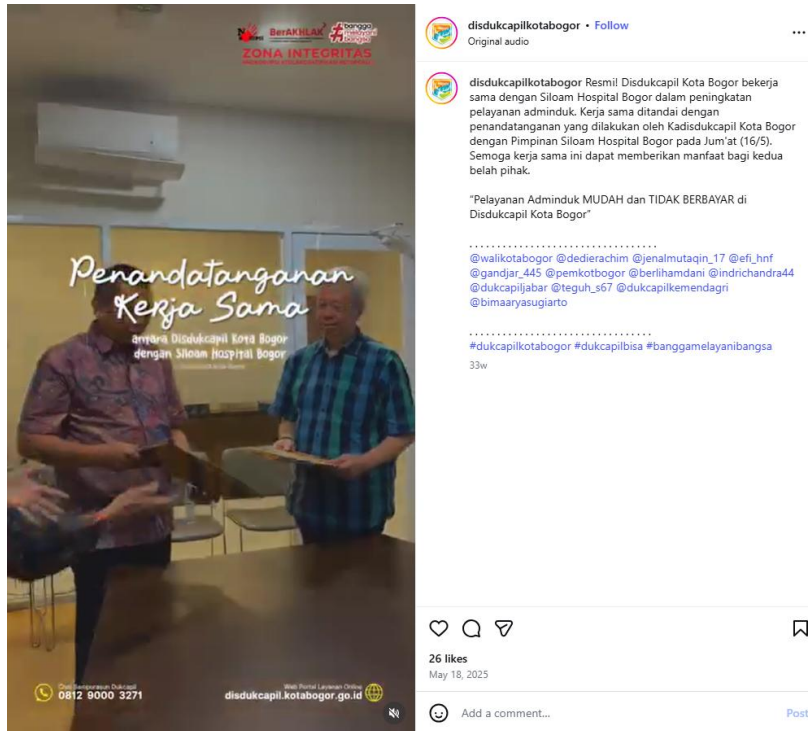
3 Agustus 2024

e) Aktivasi IKD pada Ramadhan Fest

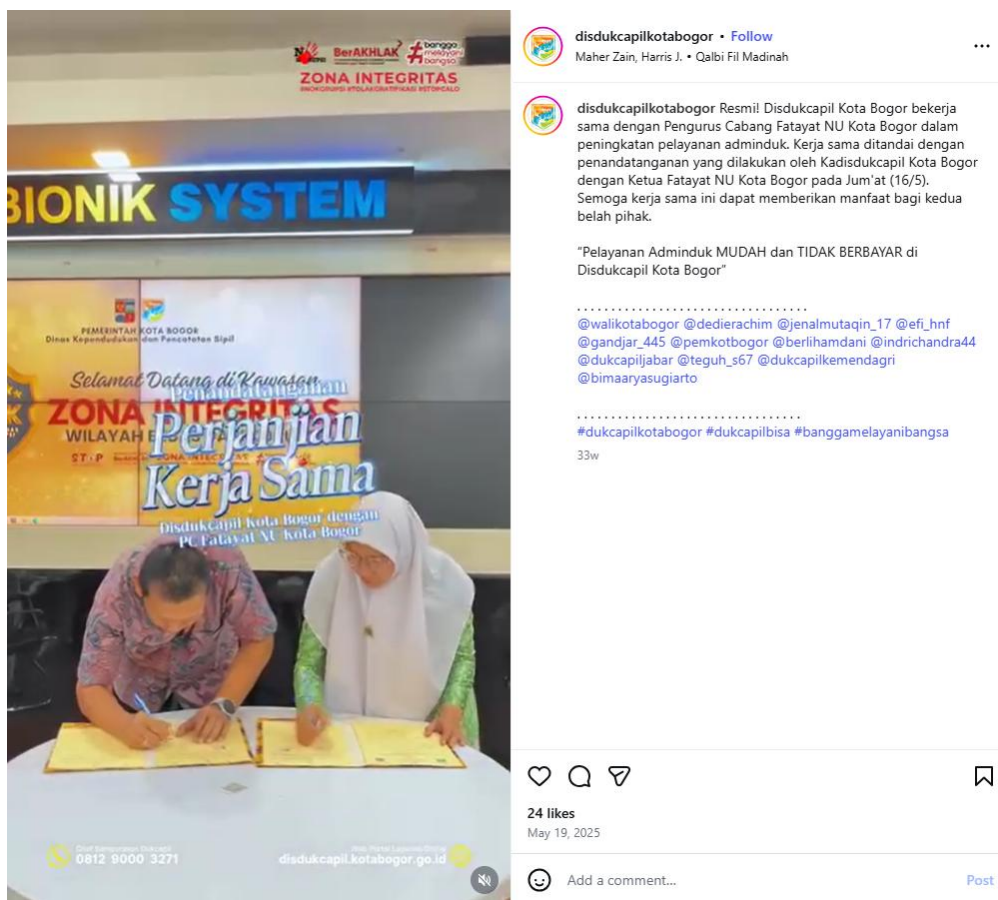


f) Perjanjian Kerjasama (PKS)

- Siloam Hospital



▪ Fatayat NU



▪ TP PKK Kota Bogor



disdukcapilkotabogor and 2 others
Original audio

disdukcapilkotabogor Resmi! Disdukcapil Kota Bogor bekerja sama dengan TP PKK Kota Bogor dalam peningkatan pelayanan adminduk. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Kadisdukcapil Kota Bogor dengan Ketua TP PKK Kota Bogor pada Selasa (22/7). Semoga kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17 @denny_dppkad @gandjar_445 @pujiati_iceu @pemkotbogor @berliamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar @teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

23w

trajeng230475 Keren ❤️

23w Reply

kangridhos Mantap

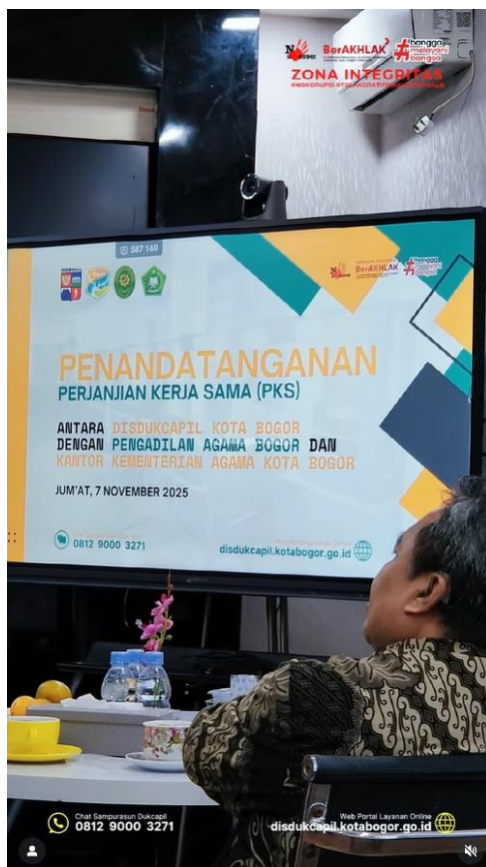
23w Reply

59 likes
July 22, 2025

Add a comment...

Post

▪ Pengadilan Agama dan Kemenag Kota Bogor



disdukcapilkotabogor and 2 others
Rizky Febian, Adrian Khalif • Alamak

disdukcapilkotabogor Kolaborasi dan kerja sama antar lembaga pemerintah menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan. Kami sangat menyambut baik kerja sama yang terjalin antara Disdukcapil Kota Bogor dengan Pengadilan Agama Bogor @pabogor dan Kantor Kementerian Agama Kota Bogor @kemenagkotabogor yang telah ditandatangani oleh pimpinan masing masing instansi pada Jum'at, 7 November 2025.

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17 @denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445 @pemkotbogor @berliamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar @teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa

8w

28 likes
November 8, 2025

Add a comment...

Post

g) Gebyar Adminduk Sadulur Disabilitas



disdukcapilkotabogor and 3 others
Maroon 5 • Payphone (feat. Wiz Khalifa)

disdukcapilkotabogor Gebyar Adminduk "SADULUR DISABILITAS" ✨
Sudah waktunya mewujudkan layanan adminduk yang ramah dan mudah bagi para penyandang disabilitas di Jawa Barat. Maka dari itu, Disdukcapil Kota Bogor bersama Disdukcapil Provinsi Jawa Barat melaksanakan pencanangan Gebyar Adminduk "SADULUR DISABILITAS" di SLB Negeri 1 Kota Bogor. Dalam kegiatan tersebut, Disdukcapil Kota Bogor memberikan pelayanan perekaman KTP Elektronik bagi pemula usia 17 tahun, pencetakan KIA dan Kartu Keluarga.

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

.....
@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17
@denny_dppkad @gandjar_445 @pemkotbogor @berlihamdani
@indrichandra44 @dukcapiljabar @teguh_s67
@dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto
.....
#dukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa
20w

mama_gesanata4sdra Trus lanjutkan ❤️
20w Reply

54 likes
August 14, 2025

Add a comment... Post

h) Kerjasama Pemanfaatan KIA dan IKD

Promo Penggunaan IKD & KIA

Hanya dengan menunjukkan KIA atau IKD, dapatkan harga spesial di The Jungle Bogor dan Rivera Outbound & Edutainment

Senin - Jum'at	Sabtu - Minggu	High Season
85.000	100.000	120.000
55.000 /orang	70.000 /orang	90.000 /orang

THE JUNGLE BOGOR

Senin - Jum'at	Sabtu - Minggu	High Season
100.000	115.000	125.000
60.000 /orang	70.000 /orang	80.000 /orang

RIVERA OUTBOUND & EDUTAINMENT

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. BERLAKU UNTUK KELUARGA WARGA KOTA BOGOR
2. 1 IKD/ KIA/ KD BERLAKU UNTUK 4 ORANG
3. TIDAK BERLAKU UNTUK BOMBONGAN
4. TIDAK DIPAT DIHARGIKAN DENGAN PROMO LAIN
5. PROMO BERLAKU S.D. 9 OKTOBER 2020

Chat Sampurasun Dukcapil
0812 9000 3271

Web Portal Layanan Online
disdukcapil.kotabogor.go.id

disdukcapilkotabogor and 3 others

disdukcapilkotabogor Kabar gembira buat warga Kota Bogor yang sudah punya IKD (Identitas Kependudukan Digital) dan KIA (Kartu Identitas Anak) ✨ Dapatkan harga spesial hanya dengan menunjukkan IKD atau KIA di @thejunglebogor dan @rivera.bogor. Setiap IKD atau KIA bisa berlaku untuk 4 orang lho! Keren banget kan? Ayo ajak keluarga, teman, bestie atau pasangan kamu untuk healing hemat ke The Jungle atau Rivera.

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

@walikotabogor @dedierachim @jenalmutaqin_17 @denny_mulyadi67 @setda_kotabogor @gandjar_445 @pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar @teguh_s67 @dukcapilkemendagri @bimaaryasugiarto

#dukcapilkotabogor #dukcapibisa #banggamelayanibangsa

8w

thejunglebogor Gaskeun min 🙏🙏

8w Reply

View replies (1)

yullygogo Kabupaten Bogor gabisa min? 🙏

8w Reply

View replies (1)

rizka0891 Ini berlaku bulan Oktober atau November ya?kok di poster sampai 26 Oktober ya?

174 likes
November 5, 2025

Add a comment...

i) Booking Antrian (Prima Antri)

disdukcapilkotabogor dan 2 lainnya
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BOOKING ANTRIAN ONLINE
DISDUKCAPIL KOTA BOGOR

PILIHAN KATEGORI LAYANAN :

Loket A : Kartu Keluarga, Akta-Akta Pencatatan Sipil, Kartu Identitas Anak (KIA), Pindah Datang.

Loket B : Perekaman KTP Elektronik bagi Pemula 17 Tahun ke Atas

Loket C : Cetak Ulang KTP yang Hilang/Rusak dan KIA yang Hilang/Rusak/Perpanjangan

MULAI 2 MEI 2024

SEBELUM DATANG KE DISDUKCAPIL KOTA BOGOR
PASTIKAN ANDA SUDAH BOOKING
LINK BOOKING ONLINE : disdukcapil.kotabogor.go.id/prima-antri

BOOKING SUDAH BISA DILAKUKAN MULAI
29 APRIL 2024

disdukcapil.kotabogor.go.id 0812-9000-3271 (Chat Only) disdukcapil.kotabogor.go.id

j) Sampurasun (Media Pengaduan Berbasis Whatsapp)

